

**KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH DAN PELAKU USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH DALAM MENINGKATKAN EKONOMI LOKAL
MASYARAKAT**

**(STUDI KASUS PADA DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN PARIWISATA KOTA MADIUN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Oleh :

INNAHA FAKIHATUL ZUHROH KHUDHORI

NIM. 105030103111034



Dosen Pembimbing:

- 1. Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si**
- 2. Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2016

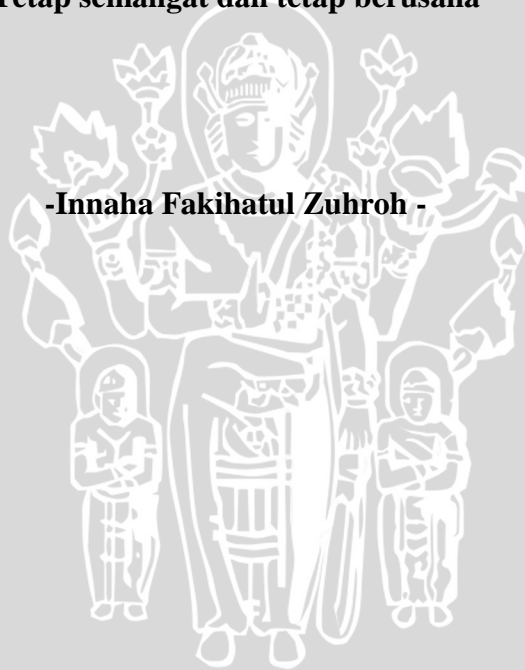
MOTTO

Tidak selamanya yang kita harapkan bisa terwujud

Namun dengan usaha dan doa semua bisa terwujud

Tetap semangat dan tetap berusaha

-Innaha Fakihatul Zuhroh -



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : **Kemitraan Pemerintah Dan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal Masyarakat (STUDI PADA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PARIWISATA KOTA MADIUN)**

Disusun oleh : **Innaha Fakihatul Zuhroh Khudhori**

NIM : **1050303111034**

Fakultas : **Ilmu Administrasi**

Prodi : **Ilmu Administrasi Publik**

Malang, 20 Juni 2016

Komisi Pembimbing

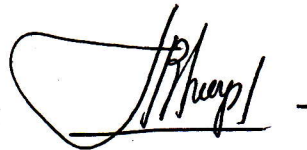
Ketua Komisi Pembimbing



Prof. Dr. Abdul Hakim M, Si

NIP. 19610202 198803 1006

Anggota Komisi Pembimbing



Dr. Ratih Nur Pratiwi M, Si

NIP. 19530801 197903 2001

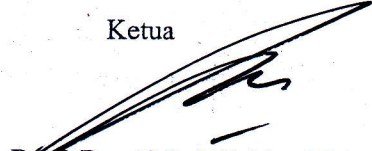
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 November 2016
Jam : 10:00 WIB
Skripsi atas nama : **Innaha Fakhimatul Zuhroh K**
Judul : **Kemitraan Pemerintah Daerah Dan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal Masyarakat (Studi Pada Dinas Koperasi Perindustrian, Perdagangan Dan Pariwisata Kota Madiun)**

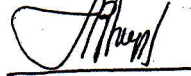
Dan dinyatakan LULUS

Ketua




Prof. Dr. Abdul Hakim M.Si
NIP. 19610202 1958503 1 006

Anggota



Dr. Ratih Nur Pratiwi M.Si
NIP. 19530807 197903 2 001

Penguji I



Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002

Penguji II



M. Chazienul Ulum, S.Sos, MPA
NIP. 19740614 200501 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapat karya atau yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang sekarang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 Pasal 70)

Malang, Oktober 2016



Innaha Fakihatul Zuhroh K
105030103111034

RINGKASAN

Innaha Fakihatul Zuhroh Khudori, 2016. **Kemitraan Pemerintah Daerah Dan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Ekonomi (Studi Pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kota Madiun)**. Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si dan Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si. 104 Hal

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Di kota madiun UMKM sangat banyak mulai dari industry rumahan atau industri pabrik. Namun UMKM yang ada, masih memiliki beberapa kendala-kendala yang menyebabkan hasil produksinya kurang maksimal. Beberapa kendala yang dihadapi oleh pengusaha UMKM di Kota Madiun antara lain minimnya mendapatkan akses permodalan, akses pemasaran, lemahnya manajemen usaha dan jiwa kewirausahaan yang masih kurang.

Penelitian ini ingin mengkaji lebih lanjut mengenai Kemitraan Pemerintah Daerah dan pelaku UMKM di Kota Madiun yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata (Diskoperindagpar) Kota Madiun serta faktor yang mendorong pemerintah dan pelaku usaha mikro kecil menengah dalam meningkatkan ekonomi lokal masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Kemitraan pemerintah daerah dan pelaku usaha mikro kecil menengah yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pariwisata Kota Madiun sampai sejauh ini sudah berjalan dengan baik, meskipun terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan pelaku UMKM. Kemitraan yang dibutuhkan dalam pengembangan pelaku UMKM adalah peningkatan bantuan pemasaran, pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dan permodalan. Selain itu ada pula faktor yang mendorong pemerintah dalam melakukan kemitraan yakni, UMKM dapat survive saat krisis ekonomi, serta kontribusi UMKM terhadap PDRB Kota Madiun.

Peneliti memberikan saran beberapa diantaranya : Pemerintah harus tetap konsisten menjaga hubungan dengan UMKM meski UMKM sudah maju dan berkembang dan memanfaatkan semua teknologi yang ada sehingga dapat meningkatkan penjualan, memanfaatkan asosiasi dengan menjadikannya sebagai sarana untuk mendapatkan pesanan atau orderan.

Kata Kunci : Kemitraan, UMKM, Ekonomi local

SUMMARY

Innaha Fakihatul Zuhroh Khudori, 2016. **Partnership of Local Government and Business Players Micro Small Medium Enterprises In Improving The Local Economy (Study In The Office For Cooperatives, Industry, Trade And Tourism of Madiun)**. Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si dan Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si..104 thing

Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) is a strategic step to improving the majority economic of Indonesian people, especially through job vacancy, reduce inequality and poverty. In madiun, there is a lot of SMEs, such as a housing industry thru a manufacturing industry. However, SMEs still has some obstacles that makes their production can't be maximum. Some of the constraints faced by SMEs in Madiun, such as, lack of access to capital, access to markets, a weakness of the Management business and the entrepreneurial spirit that is still lacking.

This research wanted a more examined about the Partnership of Local Government and SMEs in Madiun which is conducted by the Department of Cooperatives, Industry, Trade and Tourism (Diskoperindagpar) Madiun city and the factors that prompted the government and small and medium micro businesses in improving the economic of local community. This research used a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observation and documentation.

The partnership of local governments and small and medium micro businesses that conducted by the Department of Industry, national Trade, Cooperatives and Tourism Madiun, this far is been running well, although there's still some things that do not correspond to the needs and concerns of SMEs. Partnership is needed in the development of SMEs to increase in marketing assistance, fulfilling the needs of labor and capital. There are also factors that encourage the government to implement the partnership, it is that SMEs can survive the current economic crisis, as well as the contribution of SMEs to the GDP Madiun.

Some advise from the research is the government must be consistent to maintain relationships with SMEs although SMEs is progressing and developing and utilizing all the available technology in order to boost sales, leveraging the association with it as a means to get the orders.

Keywords: Partnership, SMEs, local economy

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan masa belajarnya di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dan berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul Kemitraan Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal Masyarakat (Studi Pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kota Madiun)

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Orang tuaku, Bapak dan Ibu, beserta seluruh keluargaku yang senantiasa mendoakan dan selalu memberikan dukungan sampai terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Choirul Saleh, Drs. M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
4. Bapak Prof. Dr. Adbul Hakim, M.Si selaku ketua komisi pembimbing yang telah dengan sabar memberikan masukan-masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Ratih Nur Pratiwi Dr. M.Si selaku anggota komisi pembimbing yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Para pegawai di Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Kota Madiun dan pelaku UMKM yang telah memberikan informasi yang penulis butuhkan.
7. Bapak dan Ibu tercinta, Imam Khudhori dan Nudiya Yuliani atas segala kasih sayang, pengorbanan kesabaran, dukungan materiil dan moril serta doa restu yang diberikan kepada penulis.
8. Partner perjuangan Candra Setyo Perdana Putra SH yang tiada henti selalu memberikan semangat dan do'a selama proses penyelesaian skripsi ini.
9. Kakak dan adek kembar ku yang selalu cerewet dan perhatian terhadap penulis.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu disini, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun pembaca yang berkenan mempelajarinya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan tentunya masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Malang, Oktober 2016

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	ii
RINGKASAN	iii
SUMMARY	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kotribusi Penelitian.....	13
E. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep <i>Good Governance</i>	17
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	17
2. Ciri-ciri <i>Good Governance</i>	18
3. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	18
B. Kemitraan	
1. Pengertian Kemitraan.....	21
2. Model kemitraan	22
3. Pola Kemitraan	23
C. Pembangunan Ekonomi	24
1. Pengertian Pembangunan Ekonomi	24
2. Pembangunan Ekonomi Daerah	27
3. Pengembangan Ekonomi Lokal	31
D. Usaha Mikro Kecil Menengah	33
1. Pengertian usaha mikro kecil menengah.....	33
2. Kriteria usaha mikro kecil menengah.....	34
3. Peran UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional	36
4. Peran Pemerintah terhadap UMKM.....	37
E. Konsep PPP (<i>Public-Private-Partnership</i>)	39
1. Pengertian <i>Public-Private-Partnership</i>	39
2. Karakteristik <i>Pubic Private Partnership</i>	40

3. Bentuk Dan Moadalitas <i>Public Private Partnership</i>	41
--	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	45
B. Fokus Penelitian.....	46
C. Lokasi Penelitian Dan Situs Penelitian.....	46
D. Sumber Data.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Instrumen Penelitian.....	51
G. Teknik Analisis Data.....	53
H. Keabsahan Data.....	56

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum	
1. Gamabaran Umum dan Kependudukan Kota Madiun.....	59
2. Gambaran Umum Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota Madiun.....	61
a. Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota Madiun.....	61
b. Kedudukan Dinas perindustrian, Perdagangan, koperasi dan Pariwisata Kota Madiun.....	62
B. Penyajian Data.....	70
1. Kemitraan pemerintah daerah dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Pelaku UMKM di Kota Madiun.....	71
a. Peningkatan Modal.....	71
b. Peningkatan Sumber Daya Manusia.....	76
c. Pengembangan Prasaranan (Pemasaran).....	79
2. Faktor pendorong kemitraan pemerintah dan pelaku usaha mikro kecil menengah dalam meningkatkan ekonomi lokal masyarakat.....	82
a. Faktor yang Mendorong Pemerintah.....	82
b. Kontribusi UMKM terhadap PDRB Kota Madiun.....	85
C. Analisis Data dan Pembahasan.....	86



1. Kemitraan pemerintah daerah dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Pelaku UMKM di Kota Madiun	86
a. Peningkatan Modal	88
b. Peningkatan Sumber Daya Manusia	89
c. Pengembangan Prasaranan (Pemasaran)	92
1. Faktor pendorong kemitraan pemerintah dan pelaku usaha mikro kecil menengah dalam meningkatkan ekonomi lokal masyarakat	95
a. Faktor yang Mendorong Pemerintah	95
b. Kontribusi UMKM terhadap PDRB Kota Madiun	98

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran	103

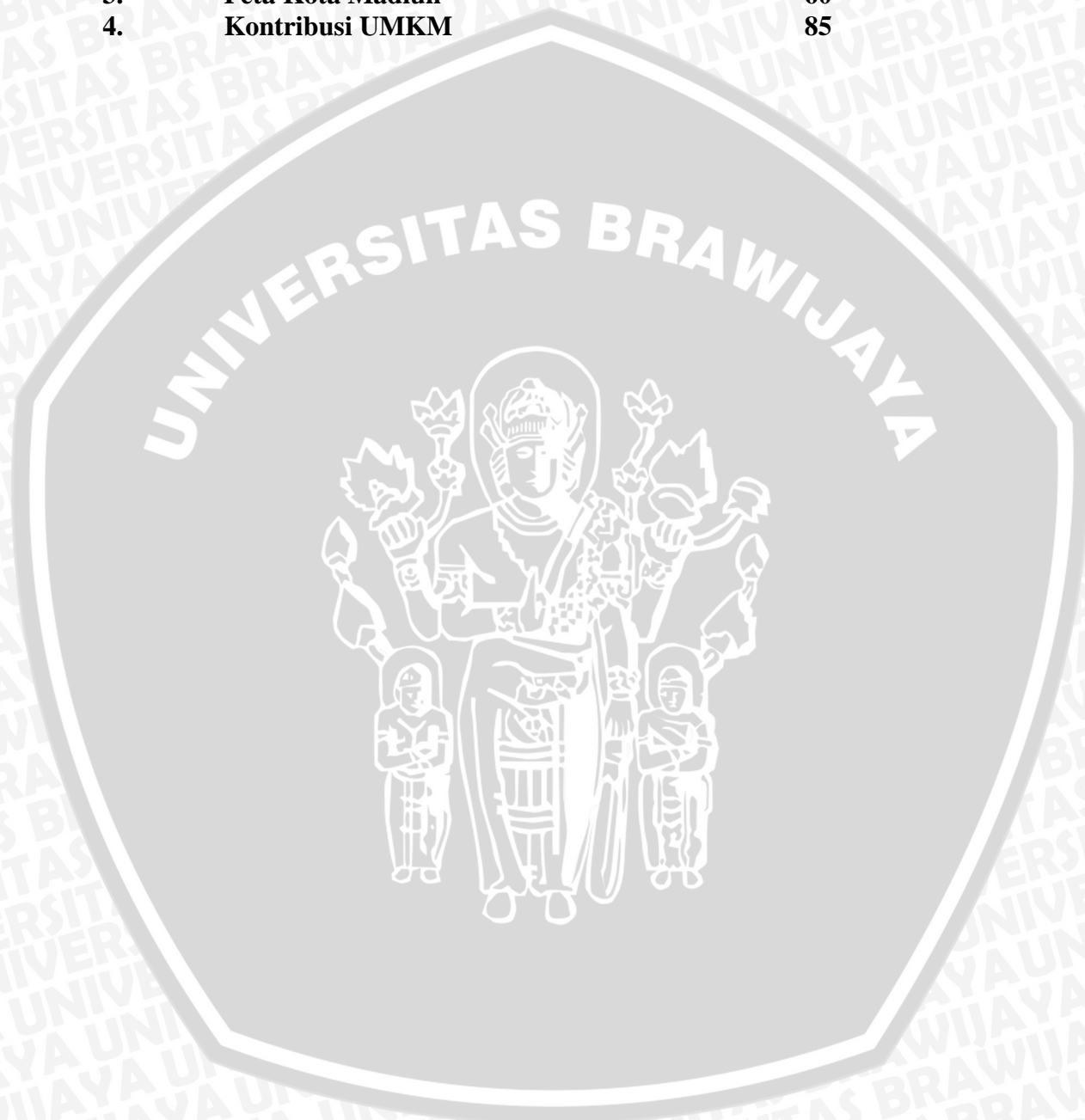
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



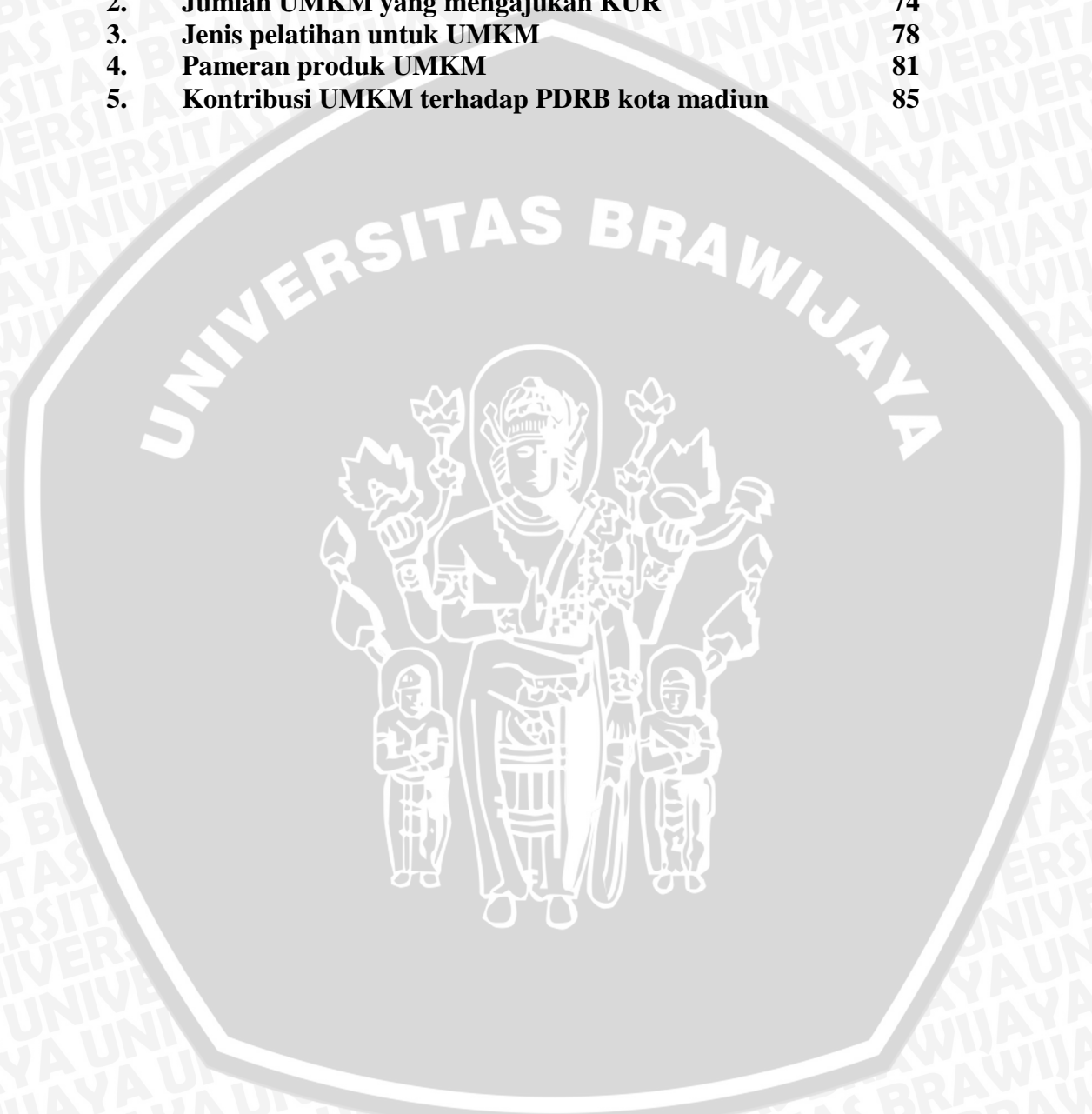
DAFTAR GAMABAR

NOMOR	Judul	HALAMAN
1.	Prinsip Kemitraan	19
2.	Analisis Data Model Internal	56
3.	Peta Kota Madiun	60
4.	Kontribusi UMKM	85



DAFTAR TABEL

NOMOR	Judul	HALAMAN
1.	Daftar beberapa UMKM yang produktif	71
2.	Jumlah UMKM yang mengajukan KUR	74
3.	Jenis pelatihan untuk UMKM	78
4.	Pameran produk UMKM	81
5.	Kontribusi UMKM terhadap PDRB kota madiun	85



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerataan pembangunan telah digariskan pada dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia keempat, yang menyatakan bahwa fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia yakni memajukan kesejahteraan umum, juga sebagai perwujudan sila kelima pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga apabila pemerataan pembangunan dapat terlaksana maka cita-cita tertinggi untuk mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud. Salah satu proses pencapaian tersebut adalah melalui pembangunan.

Menurut Tjokroamidjojo (1988:4) pembangunan adalah “upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju dan baik, sesuai dengan pandangan masyarakat itu”. Jadi, pembangunan dimaksudkan agar ada perubahan positif yang terjadi dalam semua bidang, baik itu dari segi ekonomi, sosial budaya, infrastruktur, dan bidang lainnya. Tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri yakni tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat.

Pemerataan pembangunan nasional maupun daerah tidak hanya mencakup aspek ekonomi saja, tetapi juga aspek sosial, budaya dan lingkungan hidup juga perlu diperhatikan. Hal ini dikarenakan satu aspek dan aspek lainnya saling mempengaruhi. Sehingga pertumbuhan di satu bidang harus diikuti dengan bidang lainnya. Pertumbuhan ekonomi tentu harus

diikuti pula dengan pertumbuhan di bidang sosial, misalnya tingkat pendidikan yang semakin membaik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) semakin tinggi, harapan hidup semakin meningkat, dan penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Menurut Sjafrizal (1997:35) untuk menciptakan tujuan pembangunan daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Seiring dengan sangat bervariasinya potensi sumber daya pembangunan yang dimiliki setiap daerah tersebut. Untuk itu daerah seharusnya mengetahui kegiatan sektor ekonomi mana yang potensial dalam pengembangan ekonomi daerah.

Menurut Yusuf (1999:219) salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat spesialisasi dan daya saing atau keunggulan komparatif suatu sektor di suatu daerah adalah melalui rasio kontribusi dan rasio pertumbuhan masing-masing sektor di daerah tersebut terhadap jumlah *output* total pada skala internal atau wilayah studi pada skala eksternal atau wilayah referensinya.

Dalam upaya untuk pemerataan pembangunan di daerah maka dilaksanakan otonomi daerah. Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai implementasi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah kini sedang ada di Daerah. Banyak harapan yang dimungkinkan dari penerapan Otonomi Daerah. Seiring dengan

itu tidak mudah pula masalah tantangan dan kendala yang sedang dan akan dicapai oleh Daerah.

Otonomi Daerah sekarang ini merupakan fenomena politis yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi dan demokratis, apalagi jika dikaitkan dengan tantangan masa depan memasuki era perdagangan bebas yang antara lain ditandai dengan tumbuhnya berbagai bentuk kerja sama regional, perubahan pola/sistem informasi global.

Menurut Manan (1994:21) melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan anggaran belanja daerah secara ekonomi wajar, efisien dan efektif termasuk kemampuan perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja serta mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun publik.

Menurut Sujanto (1990:100) berpendapat dalam rangka pelaksanaan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya tersebut, masalah sumber keuangan dana sangat penting peranannya, baik untuk kelancaran penyelenggaraan roda pemerintah dan pembangunan, maupun untuk pelaksanaan urusan rumah tangganya daerah itu sendiri. Hal ini tentunya tidak terlepas dari sistem dan prosedur keuangan daerah itu sendiri, yang menyangkut proses alokasi sumber pendapatan daerah serta ketentuan-ketentuan yang mendasarinya. Kebijakan pemberian sumber pendapatan

kepada daerah tidak terlepas kaitannya dengan jiwa dan semangat Otonomi Daerah.

Suatu daerah otonom jika sudah benar-benar mandiri, harus mempunyai sumber-sumber keuangan, dalam arti daerah tersebut mempunyai sumber-sumber pendapatan sendiri untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga dan pembangunan di daerah. Tanpa mempunyai sumber pendapatan sendiri, maka daerah hanya terus bergantung dari pemerintah pusat (Pamudji, 1990:61). Jadi untuk peningkatan pembangunan daerah dan menuju daerah yang otonom diperlukan peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakatnya di daerah. Disamping itu dengan memperhatikan kemampuan daerah perlu ditingkatkan pendapatan daerah, baik dengan pemungutan yang intensif, wajar, dan tertib terhadap sumber-sumber pendapatan baru sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan/ kepentingan rasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Alwi (2001 : 27) pemberdayaan mempunyai arti yang lebih luas dibandingkan dengan penyediaan lapangan/ kesempatan kerja, karena meliputi faktor yang lebih kompleks antara lain alur pikir sistem, faktor nilai yang dianut, persepsi, motivasi, kualitas manusia, sumber daya alam dan iptek yang digunakan. Semua faktor tersebut harus dapat diintegrasikan melalui dimensi proses yang benar. Apabila pemberdayaan tidak bisa berjalan dengan lancar maka akan menimbulkan kesenjangan baik ekonomi maupun sosial. Jadi kesenjangan ekonomi di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh masalah-masalah struktural, sehingga tindakan penanggulangan yang

dilakukan juga harus berdimensi struktural pula. Strategi pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi harus diganti yang berorientasi pemerataan ekonomi dan pertumbuhan sosial.

Menurut Payne dalam RUMK Minto. (2008:77-78), yang mengemukakan bahwa suatu pemberdayaan (*empowerment*), pada intinya, ditujukan guna: *"To help clients gain power of decisions and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self confidence to use power and by transferring power from the environment to clients."* (Membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya).

Terdapat 3 dimensi pokok pemberdayaan masyarakat menurut Payne dalam RUMK Minto (2008:77-78) yaitu :

1. Inti : Investasi untuk meningkatkan aset dan kemampuan masyarakat miskin, baik sebagai individu maupun secara kolektif. Arah : Kemampuan memecahkan masalah secara swadaya dan meningkatkan daya tawar dalam hubungan kelembagaan.
2. Penunjang : Reformasi kelembagaan pemerintahan menuju *good governance* dan akuntabilitas publik, baik akibat tuntutan masyarakat maupun karena keharusan penyesuaian dengan pergeseran paradigma pembangunan
3. Mekanisme : Merubah tata hubungan kekuasaan melalui proses dialogis/ interaktif menuju tata hubungan berdasarkan kesetaraan, keadilan dan kemartabatan.

Dari mekanisme di atas, penanggulangan kemiskinan harus komprehensif. Mulai dari peningkatan pendidikan dan ketrampilan, penyediaan kesempatan kerja dan berusaha sampai kepada penyiapan lembaga-lembaga pendukung. Masyarakat didukung untuk mengembangkan wirausaha baru yang berbasis pada pengembangan ekonomi lokal.

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana telah disinggung di atas, salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Salah satu sektor yang dapat diberdayakan sebagai cara untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat yaitu dengan adanya pemberdayaan UMKM. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga berperan dalam memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Sejatinya pemberdayaan UMKM merupakan gerakan kemitraan antar berbagai pihak. Pemerintah tetap memegang peranan terbesar dalam upaya pemberdayaan tersebut. Keterlibatan pemerintah dalam memberdayakan UMKM telah diatur jelas dalam UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM. Undang-Undang ini memuat tentang ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif, dan ketentuan pidana.

Kementerian Negara Koperasi dan UMKM menyatakan bahwa Indonesia saat ini memiliki hampir 56,5 juta unit UMKM (Priyambodo RH, 2013). Hal tersebut akan mengurangi tingkat pengangguran, baik pada tingkat lokal pun nasional, produk-produk UMKM setidaknya telah memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional karena tidak sedikit produk-produk UMKM itu mampu menembus pasar internasional.

Konkretnya, kehadiran UMKM telah membantu program pemerintah untuk menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya, meminimalisir ketimpangan pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan serta mampu meningkatkan perekonomian daerah secara signifikan. UMKM di negara berkembang seperti di Indonesia memiliki nilai ekspor yang terus meningkat, karena ada ciri khas lokal Indonesia dan merupakan produk budaya (*culture product*). Sifat UMKM yang *fleksible* serta dapat dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat bawah dan menengah, dan mereka dapat dengan mudah berpartisipasi di dalamnya. Fleksibilitas yang dimiliki oleh UMKM dan tingkat skala yang kecil, telah meletupkan semangat untuk memulai usaha kapan saja dan bersifat mudah untuk mengawalinya. Mengingat modal yang diperlukan untuk memulai usaha hanya skala kecil, membutuhkan teknologi lokal yang bersifat sederhana dan apa adanya, yang mana dominan bertumpu pada kemampuan masyarakat lokal.

Pemerintah menyadari pentingnya pengembangan kegiatan UMKM yang dianggap sebagai salah satu alternatif penting yang mampu mengurangi

beban berat yang dihadapi perekonomian nasional dan daerah. Hal ini karena UMKM merupakan kegiatan usaha dominan yang dimiliki bangsa Indonesia. Selain itu pengembangan kegiatan UMKM relatif tidak memerlukan modal yang besar dan selama ini UMKM relatif “*survive*”. Sejalan dengan otonomi daerah, pembangunan UMKM merupakan salah satu bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan wajib yang diserahkan kepada kabupaten/kota. Oleh karena itu konsekuensinya pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam menggali dan mengembangkan potensi UMKM, sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah. Sektor ekonomi UMKM yang memiliki proporsi unit usaha terbesar berdasarkan statistik UMKM tahun 2004-2005 adalah sektor :

- (1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan;
- (2) Perdagangan, Hotel dan Restoran;
- (3) Industri Pengolahan;
- (4) Pengangkutan dan Komunikasi;
- (5) Jasa.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Menurut Raja (2003:72) memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro, meso dan mikro yang meliputi:

- (1) Penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi;

- (2) Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia;
- (3) Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); dan
- (4) Pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin.

Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil. Seperti halnya di Pemerintah Kota Madiun sekarang ini berusaha untuk memberdayakan UMKM yang ada di Kota Madiun. Kota Madiun merupakan salah satu kota yang terletak di Jawa Timur dimana dapat dijumpai keberadaan berbagai jenis usaha Mikro, Kecil dan Menengah hampir di setiap sudut kota. Dengan adanya usaha-usaha tersebut diatas ternyata terdapat banyak manfaat sosial yang dapat dirasakan, antara lain : dapat menciptakan peluang usaha yang luas dengan pembiayaan yang relatif murah, mampu membuka banyak lapangan pekerjaan baru sehingga masyarakat sekitar (usia produktif yang tidak bekerja) bisa memperoleh kesempatan untuk bekerja dengan cukup mudah, selain itu UMKM memiliki kedudukan yang komplementer terhadap usaha besar karena usaha ini menghasilkan produk yang relatif lebih murah dan sederhana, yang biasanya tidak disediakan usaha berskala besar.

Kota Madiun adalah salah satu Kota yang mempunyai harapan yang besar meningkatkan sumber penerimaan asli daerahnya melalui pemberdayaan sektor UMKM. Menurut data Badan Pusat Statistik Kota

Madiun (2013) mencatat, pada tahun 2008 jumlah UMKM di wilayah setempat mencapai 21.800 unit, tahun 2009 naik menjadi 22.334 unit, dan hingga akhir tahun 2011 naik menjadi 22.790 unit. Bisa dibilang di Kota Madiun banyak sekali industri dalam arti *home industry*, yaitu *home industry* atau industri rumah tangga, seperti contohnya sambel pecel, lempeng puli, madumongso, roti bluder dan lain-lain. Masih banyak lagi industri-industri yang lainnya. Keadaan ini tentu saja berdampak pada terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat hingga akhirnya dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup mereka. Selain itu manfaat lain yang dapat dirasakan adalah tersedianya berbagai macam barang dan jasa kebutuhan hidup sehari-hari. Dan dengan begitu masyarakat akan lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa harus membeli di tempat yang jauh serta dengan harga yang lebih terjangkau.

Pemerintah Kota Madiun berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai kesempatan berusaha di bidang UMKM. Namun usaha tersebut terkendala dari pihak UMKM itu sendiri. Adapun serangkaian masalah yang dihadapi oleh UMKM, antara lain:

1. Modal terbatas
Keterbatasan modal terutama disebabkan oleh keterbatasan akses langsung terhadap berbagai informasi, layanan dan fasilitas keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal maupun non formal.
2. Kemampuan teknik produksi dan manajemen terbatas
Pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan usaha sulit ditemukan, antara lain karena pengetahuan dan *managerial skill* pengusaha Mikro Kecil Menengah belum mampu menyusun strategi bisnis yang tepat. Kemampuan usaha dalam mengorganisasikan diri dan karyawan

masih lemah, sehingga terjadi pembagian kerja yang tidak jelas dan sering kali pengusaha harus bertindak "one men show"

3. Pemasaran UMKM

Pemasaran yang relatif sulit karena dihadapkan pada struktur pasar yang sangat kompetitif. Bukan saja antara usaha kecil melainkan ada kalanya juga dengan usaha besar. Di samping itu, kesulitan pemasaran juga disebabkan oleh berbagai faktor pendukung utama seperti informasi mengenai perubahan dan peluang pasar yang ada di dalam maupun di luar negeri.

4. Permasalahan sumber daya manusia yang rendah

Di samping hal diatas, UMKM juga masih menghadapi berbagai permasalahan yang terkait dengan iklim usaha seperti:

1. Besarnya biaya transaksi, panjangnya proses perizinan dan timbulnya berbagai pungutan
2. Praktik usaha yang tidak sehat. Selain itu, otonomi daerah yang diharapkan mampu mempercepat tumbuhnya iklim usaha yang kondusif bagi UMKM ternyata belum menunjukkan kemajuan yang merata.

Melihat kendala-kendala diatas, maka Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata (Diskoperindagpar) dan UMKM Kota Madiun merasa perlu melakukan sinergi atau kerjasama dengan UMKM. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata (Diskoperindagpar) adalah unsur pelaksana Pemerintah yang memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pengkoperasian pengusaha mikro kecil menengah serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Demikian pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah sudah menjadi salah satu tugas pokok dalam program kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata (Diskoperindagpar) ini.

Program pengembangan UMKM itu meliputi kegiatan bimbingan dan pengarahaan, pengadaan atau bantuan permodalan, pengembangan jaringan pemasaran, pengembangan program kemitraan, dan juga melakukan evaluasi terhadap hasil dari program tersebut.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah di era otonomi daerah adalah dengan cara memaksimalkan peran serta masyarakat dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Menurut Sumodoningrat oleh Mardikanto dan Soebianto (2012:32) menyatakan bahwa “dalam dunia bisnis, pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran,dll”. Melihat dari hal tersebut yaitu dalam menentukan arah pembangunan dan secara praktis menunjuk pada upaya-upaya memberdayakan sektor Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang notabene pelakunya mayoritas adalah rakyat yang kurang dalam pengaksesan permodalan dan penguasaan pasar.

UMKM yang ada, dalam mengembangkan usahanya masih memiliki beberapa kendala-kendala yang menyebabkan hasil produksinya kurang maksimal. Beberapa kendala yang dihadapi oleh pengusaha UMKM di Kota Madiun antara lain minimnya mendapatkan akses permodalan, akses pemasaran, lemahnya manajemen usaha dan jiwa kewirausahaan yang masih kurang. Serta masih banyak pengusaha yang belum memiliki ijin usaha perdagangan Pemberdayaan UMKM di Kota Madiun yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata

(Diskoperindagpar) Kota Madiun. Penelitian ini ingin mengkaji lebih lanjut mengenai sinergi Pemerintah Kota Madiun dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk meningkat ekonomi lokal masyarakat.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengambil judul skripsi “ **Kemitraan Pemerintah Daerah Dan Pelaku Usaha Mikro Menengah Keatas Dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal Masyarakat**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kemitraan pemerintah dan pelaku usaha mikro kecil menengah dalam meningkatkan ekonomi lokal masyarakat?
2. Apa faktor yang mendorong pemerintah dan pelaku usaha mikro kecil menengah dalam meningkatkan ekonomi lokal masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan mendiskripsikan kemitraan pemerintah kota madiun dalam meningkatkan ekonomi lokal masyarakatnya.
2. Mengetahui dan mendiskripsikan mengenai faktor yang mendorong peningkatan ekonomi lokal masyarakat.

D. Kontribusi penelitian :

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan nilai baik secara teoritis maupun praktis terhadap sinergi Pemerintah Kota Madiun dengan pelaku UMKM dalam meningkatkan ekonomi lokal masyarakat. Adapun kontribusi peneliti yang di berikan antara lain:

1. Akademis

Sebagai bahan pengembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi dan sarana untuk mengaktualisasikan sebagai ilmu yang telah di terima dalam perkuliahan.

2. Praktis

- a. Sebagai bahan masukan Pemerintah Kota Madiun untuk meningkatkan ekonomi lokal menjadi lebih baik.
- b. Sebagai cara mengaktualisasikan kemampuan peneliti dalam mendiskripsikan serta menganalisis kebijakan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan ekonomi lokal.
- c. Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa lain yang berminat melakukan penelitian dengan tema yang sama.

E. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori- teori yang digunakan dalam pembahasan tema penelitian ini. Diantaranya meliputi konsep dasar pembangunan ekonomi, konsep dasar Usaha Kecil Menengah, dan konsep dasar kemitraan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dikemukakan metode yang digunakan dalam penelitian yang meliputi : jenis penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisa data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penyajian data (yang terkait dengan fokus penelitian), analisa data dan interpretasi data (mensinkronkan fokus, temuan data dan sejumlah teori yang ada).

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari keseluruhan hasil dan pembahasan dan juga saran untuk masalah yang dihadapi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep *Good Governance*

1. Pengertian *Good Governance*

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *Governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu *actor* dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut definisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri (Sumarto, 2003:1).

Dapat dikatakan bahwa *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam

menjalankan desentralisasi. Disisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

2. Ciri-Ciri *Good Governance*

Menurut Sumarto (2003:3) dalam dokumen kebijakan *United Nation Development Programme* (UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri *Good Governance* yaitu:

- a. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
- b. Menjamin adanya supremasi hukum.
- c. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat.
- d. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

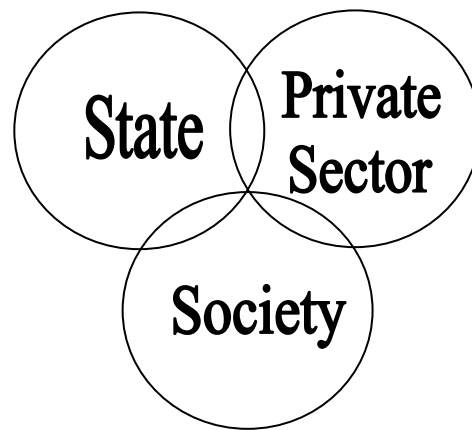
Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas. Artinya, proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi pengambilan keputusan dengan adil seluruh *stakeholder*.

3. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan diri birokratis *elitis* menjadi birokrasi *populis*. Dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita *Good Governance* pada akhirnya

mensyaratkan keterlibatan organisasi pemasyarakatan sebagai kekuatan

Hubungan Antar Sektor



Gambar 1. Prinsip Kemitraan dalam Konsep *Good Governance*

penyeimbang Negara.

Namun cita *Good Governance* kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan ke depan. Peranan implementasi dari prinsip *Good Governance* adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para *stakeholders* dalam memenuhi kepentingannya masing-masing. Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *Good Governance*, yaitu:

- a. Partisipasi (*Participation*). Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-anak mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan. Karena tanpa partisipasi orang tua, pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan mampu bisa mengatasinya. Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin rusak yang mana akan

- membawa pengaruh terhadap anak-anak mereka jika tidak ada pengawasan dari orang tua mereka.
- b. Penegakan hukum (*Rule Of Law*). Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam penyelenggaraannya. Aturan-aturan itu berikut sanksinya guna meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhi. Aturan-aturan tersebut dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan seoptimal mungkin.
 - c. Transparansi (*Transparency*). Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor kepada para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, dimana salah satu dapat menimbulkan percekocokan antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebab manajemen yang kurang transparan. Apalagi harus lebih transparan di berbagai aspek baik dibidang kebijakan, baik di bidang keuangan ataupun bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam pendidikan.
 - d. Responsif (*Responsiveness*). Salah satu untuk menuju cita *Good Governance* adalah responsif, yakni *supervisor* yang peka, tanggap terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di lembaga pendidikan, atasan juga harus bisa memahami kebutuhan masyarakatnya, jangan sampai *supervisor* menunggu staf-staf menyampaikan keinginan-keinginannya. *Supervisor* harus bisa menganalisa kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga bisa membuat suatu kebijakan yang strategis guna kepentingan-kepentingan bersama.
 - e. Konsensus (*Consensus Orientation*). Aspek fundamental untuk cita *Good Governance* adalah perhatian *supervisor* dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan keputusan secara konsensus, di mana pengambilan keputusan dalam suatu lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama (pencapaian mufakat). Dalam pengambilan keputusan harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak juga dapat menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga. Sehingga keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan.
 - f. Kesetaraan dan keadilan (*Equity*). Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh *supervisor* dan para staf-staf didalam perlakuannya, di mana dalam suatu lembaga pendidikan yang plural baik segi etnik, agama dan budaya akan selalu memicu segala permasalahan yang timbul. Proses pengelolaan *supervisor* yang baik itu harus memberikan peluang, jujur dan adil. Sehingga tidak ada seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya.
 - g. Efektifitas dan efisien. Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna, efektifitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau besarnya kepentingan dari berbagai kelompok.

Sedangkan efisien dapat diukur dengan rasionalisasi untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lembaga. Di mana efektifitas dan efisien dalam proses pendidikan, akan mampu memberikan kualitas yang memuaskan.

- h. Akuntabilitas. Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban *supervisor* terhadap staf-stafnya, sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga. Setiap *supervisor* harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan, perbuatan maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga.
- i. Visi Strategi (*Strategic Vision*). Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang akan datang mungkin menjadi perangkap bagi *supervisor* dalam membuat kebijakan-kebijakan. Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk menangani perubahan yang ada.

B. Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Partnership dalam Hefitah (2003:119) diartikan sebagai prespektif baru yang merupakan penjabaran dari *good governance*. *Partnership* menurut Hefitah hanya dapat berlangsung apabila ada kepercayaan antar pihak yang terlibat. Pemerintah perlu terlebih dahulu menghilangkan rasa ketidakpercayaan komunitas terhadap dirinya. Tanpa t, prospek menuju *good governance* sulit dicapai. Dimasa lalu, penyedia infrastruktur, dan pelayanan publik lain merupakan tanggung jawab dari pemerintah semata. Sektor swasta dan komunitas sendiri tidak banyak terlibat.

Pengertian lain dari kemitraan menurut Mutis dalam buku (Setiawan, 2004:32) dapat dilihat dari beberapa dimensi. Dimensi ekonomi, Thoby Mutis mengatakan bahwa kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu

untuk meraih manfaat bersama ataupun keuntungan bersama sesuai prinsip saling membutuhkan dan saling mengisi sesuai kesepakatan yang muncul.

Pengertian lain dari Sulistiyani (2004:129) kemitraan dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu, atau kompanyon”. Sedangkan *partnership* tersebut diartikan menjadi persekutuan atau perkognisian. Bertolak dari pengertian tersebut, maka kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak atau lebih
- b. Memiliki kesamaan visi mencapai tujuan
- c. Ada kesepakatan
- d. Saling membutuhkan

Tujuan dengan adanya kemitraan ini yaitu untuk mencapai hasil lebih sempurna, dengan memberikan keuntungan-keuntungan atau manfaat antar pihak yang bekerjasama. Agar tercapai tujuan kedua belah pihak harus dengan maksimal berkomitmen memberikan hasil kerja yang terbaik agar terjalin hubungan yang saling menguntungkan.

Dari penjabaran pengertian menurut para ahli di atas bisa diambil kesimpulan bahwa kemitraan merupakan proses kerjasama yang dilakukan dua belah pihak atau lebih yang mempunyai visi yang sama untuk mencapai tujuan, dan antara kedua belah pihak atau lebih tersebut harus ada saling percaya, untuk memperoleh kesepakatan dalam bekerjasama dan saling menguntungkan.

2. Model Kemitraan

Kemitraan dapat dilakukan oleh pihak perseorangan, kelompok, dan juga badan hukum. Pihak-pihak yang terkait dapat memiliki status yang setara atau *sebordinate*, memiliki kesamaan misi, atau misi berbeda tetapi saling mengisi/melengkapi secara *fungsuional*. Berikut adalah model-model kemitraan menurut Sulistiyani (2004 :130) :

a. Model kemitraan yang bertolak dari pemahaman akan dunia organisme:

1) Kemitraan semu

Merupakan persekutuan yang terjadi antar dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan yang lain. Model ini tampak nyata pada pola pembangunan dimasa orde baru yang dulu digemborkan slogan “pembangunan dari dan oleh pemerintah untuk rakyat”. Rakyat sebagai mitra kerja pemerintah sesungguhnya tidak mengetahui apa makna atas semua itu.

2) Kemitraan Mutualistik

Kemitraan ini merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, saling menguntungkan, sehingga akan dapat mencapai tujuan.

3) Kemitraan Konjugasi

Kemitraan yang ini dianalogikan dari kehidupan “*paramecium*”. Dua *paramecium* melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelaan diri. Jadi dua pihak yang bermitra ini dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

b. Model kemitraan berdasarkan azas kehidupan organisasi pada umumnya:

1) *Subordinate union of partnership*

Kemitraan ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain.

2) *Linear union of partnership*

Kemitaan ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki persamaan secara relatif. Kesamaan tersebut dapat berupa

tujuan, atau misi, besaran/volume usaha organisasi, status atau legalitas

3) *Linear collaboative unio of partnership*

Kemitraan jenis ini tidak membedakan besaran atau volume, status/legalitas, atau lebih kekuatan para pihak yang bermitra. Yang menjadi tekanan utama adalah visi misi saling mengisi satu dengan yang lainnya.

3. Pola Kemitraan

Menurut Partomo (2002:31-32), pola kemitraan usaha antara usaha besar dengan usaha kecil dan menengah, antara lain:

- a. Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara UKM dengan usaha besar yang didalamnya UKM bertindak sebagai inti dan UKM sebagai plasma. Perusahaan ini melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan modal, bimbingan teknis, dan pemasaran hasil produksi.
- b. Pola sub kontrak adalah hubungan kemitraan antara UKM dengan usaha besar, dimana UKM memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha besar sebagai bagian dari produksinya.
- c. Pola dagang umum adalah hubungan kemitraan antara UKM dan usaha besar, dimana usaha besar memasarkan hasil produksi UKM dan UKM memasok kebutuhan yang diperlukan usaha besar sebagai mitranya.
- d. Pola waralaba adalah hubungan kemitraan di mana usaha besar sebagai pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan saluran distribusi kepada penerima waralaba (UKM) dengan disertai bantuan dan bimbingan manajemen.
- e. Pola keagenan adalah hubungan kemitraan dimana UKM memberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada usaha besar sebagai mitranya.

C. Pembangunan Ekonomi

1. Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pembangunan adalah manifestasi dari suatu proses menuju kemajuan material perekonomian, sehingga ukuran-ukuran keberhasilannya dapat terlihat dari besaran indikator ekonomi seperti

pertumbuhan GDP, pertumbuhan PDRB, proses akumulasi modal untuk investasi, dan tingkat konsumsi masyarakat. Dengan karakteristik semacam itu, negara-negara berlomba menggapai kemakmuran ekonomi lewat serangkaian penyelenggaraan pembangunan secara sistematis, dengan tujuan utama memuaskan masyarakat (individu) secara material. Filsafat pembangunan seperti ini sering disebut dengan istilah “fordisme”, yang merujuk kepada upaya terciptanya masyarakat dunia yang makmur berdasarkan maksimisasi kegunaan tanpa batas, yang dibentuk melalui tiga elemen penting, yaitu rasionalitas, efisiensi, dan produksi/konsumsi massal (Yustika, 2002:49).

Dalam buku (M.P.Todaro, 1983:124) Langkah-langkah pembangunan ekonomi sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan dalam struktur sosial, sikap-sikap yang sadar terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran, ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut. Dengan demikian pembangunan ekonomi merupakan usaha suatu masyarakat untuk dapat mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat, sedangkan usaha-usaha pembangunan secara keseluruhan meliputi juga usaha-usaha pembangunan sosial, politik dan kebudayaan. Dengan adanya pembatasan tersebut maka pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan

perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 1985:13).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pembangunan ekonomi meliputi tiga sifat penting. Pembangunan ekonomi merupakan :

1. Suatu proses, yang berarti perubahan yang terjadi secara terus-menerus.
2. Usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan
3. Kenaikan pendapatan per kapita itu harus berlaku dalam jangka panjang.

Di dalam analisis, pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai suatu proses yang saling berkaitan, berhubungan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan itu sendiri. Sehingga pada akhirnya hasil dari pembangunan ekonomi tersebut dapat dilihat. Dalam buku (Winardi, 1983:4) H.F.Wiliamson mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses, dimana suatu negara dapat menggunakan sumber-sumber daya produksinya sedemikian rupa, sehingga dapat memperbesar produk per kapita negara tersebut

Rostow dalam buku Sadono (1985:103) mengartikan pembangunan ekonomi sebagai suatu usaha dan proses yang menyebabkan perubahan dari ciri-ciri penting dalam masyarakat, yaitu perubahan dalam keadaan sistem politik, struktur sosial, nilai-nilai masyarakat dan struktur kegiatan ekonomi. Selain itu pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memperbesar pendapatan per kapita dan meningkatkan produksi dengan jalan menambah peralatan modal serta meningkatkan keahlian.

Menurut Djojohadikusumo (1987:39) ukuran untuk suatu kemajuan tidak hanya pendapatan per kapitanya melainkan juga produktifitasnya.

Pendapat para ahli mengatakan pembangunan ekonomi sebagai:

1. Peningkatan dalam pendapatan per kapita masyarakat, yaitu tingkat pertumbuhan GDP suatu tahun tertentu melebihi dari tingkat pertambahan penduduk.
2. Perkembangan GDP yang berlaku dalam suatu masyarakat yang dibarengi dengan perombakan dan modernisasi dalam struktur ekonominya, yang pada umumnya masih bercorak tradisional (Sukirno, 1985 : 14).

Pembangunan ekonomi bukan saja berarti perombakan dalam corak kegiatan ekonomi masyarakat tetapi juga merupakan perombakan dalam sikap masyarakat dan berbagai aspek dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat lainnya. Syarat utama pembangunan ekonomi adalah bahwa proses pertumbuhan harus bertumpu pada kemampuan perekonomian di dalam negeri untuk memperbaiki nasib dan prakarsa. Untuk menciptakan kemajuan material harus diprakarsai oleh yang bersangkutan dan tidak dapat digabungkan dari luar, kekuatan ini sebaiknya tidak hanya untuk merangsang atau membantu kekuatan nasional. Bantuan ini hanya bersifat mengawali atau merangsang perubahan dan tidak bersifat mempertahankan (M.L.Jhingan, 1999:41).

2. Pembangunan Ekonomi Daerah

Menurut Nugroho dan Dahuri (2004:165) perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai upaya menghubungkan pengetahuan atau teknik yang dilandasi kaidah-kaidah ilmiah ke dalam praksis (praktik-praktik yang dilandasi oleh teori) dalam perspektif kepentingan orang

banyak atau publik. Menurut Sirojuzilam dan Mahalli (2010:67) dalam upaya pembangunan regional, masalah yang terpenting yang menjadi perhatian para ahli ekonomi dan perencanaan wilayah adalah menyangkut proses pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan

Dalam perencanaan pembangunan nasional maupun dalam perencanaan pembangunan daerah, pendekatan perencanaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional (wilayah). Pendekatan sektoral dengan memfokuskan perhatian pada sektor-sektor kegiatan yang ada di wilayah tersebut. Pendekatan ini mengelompokkan kegiatan ekonomi atas sektor-sektor yang seragam atau dianggap seragam. Pendekatan regional melihat pemanfaatan ruang serta interaksi berbagai kegiatan dalam ruang wilayah. Jadi, terlihat perbedaan fungsi ruang yang satu dengan ruang lainnya dan bagaimana ruang itu saling berinteraksi untuk diarahkan kepada tercapainya kehidupan yang efisien dan nyaman. Perbedaan fungsi terjadi karena perbedaan lokasi, perbedaan potensi, perbedaan aktivitas utama pada masing-masing ruang yang harus diarahkan untuk bersinergi agar saling mendukung penciptaan pertumbuhan yang serasi dan seimbang (Tarigan, 2006:47).

Sasaran utama dari pembangunan nasional adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan hasil-hasilnya demikian juga ditujukan bagi pemantapan stabilitas nasional. Hal tersebut sangat ditentukan keadaan pembangunan secara kedaerahan. Demikian para perencana pembangunan nasional harus mempertimbangkan aktifitas

pembangunan dalam konteks kedaerahan tersebut sebab masyarakat secara keseluruhan adalah bisnis dan bahkan merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan nasional.

Pembangunan wilayah bukanlah semata-mata terdorong oleh rendahnya tingkat hidup masyarakat melainkan merupakan keharusan dalam meletakkan dasar-dasar pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat, untuk masa yang akan datang. Dengan dilaksanakannya pembangunan daerah diharapkan dapat menaikkan taraf hidup masyarakat sekaligus merupakan landasan pembangunan nasional akan berhasil apabila pembangunan masyarakat berhasil dengan baik. Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan di setiap daerah akan berbeda pula. Peniruan mentah-mentah terhadap pola kebijaksanaan yang pernah diterapkan dan berhasil pada suatu daerah, belum tentu memberi manfaat yang sama bagi daerah yang lain (Munir, 2002:65).

Pada dasarnya pembangunan daerah dilakukan dengan usaha-usaha sendiri dan bantuan teknis serta bantuan lain-lain dari pemerintah. Dalam arti ekonomi pembangunan daerah adalah memajukan produksi pertanian dan usaha-usaha pertanian serta industri dan lain-lain yang sesuai dengan daerah tersebut dan berarti pula merupakan sumber penghasilan dan lapangan kerja bagi penduduk.

Dalam strategi pembangunan wilayah aspek-aspek pokok yang penting dipecahkan adalah di daerah-daerah mana serangkaian

pembangunan selayaknya dijalankan. Untuk beberapa proyek letak daerahnya sudah khusus dan tidak dapat lagi dipindahkan, seperti proyek bendungan untuk tenaga listrik dan irigasi, proyek pertambangan dan sebagainya.

Sebelum suatu daerah menyusun berbagai langkah-langkah dalam pembangunan daerahnya dengan demikian suatu daerah mempunyai kekuasaan yang lebih terbatas dalam usaha mencapai tujuan pembangunannya sebab program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan suatu daerah tidak dapat bertentangan dengan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Jadi pada hakekatnya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh sesuatu daerah merupakan pelengkap perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat yaitu membuat suatu program untuk menyebarkan proyek-proyek ke berbagai daerah dengan tujuan agar penyebaran tersebut akan memberikan sumbangan yang optimal kepada usaha pemerintah untuk membangun pembangunan daerah.

Dalam prakteknya tujuan tersebut tidak selalu tercapai karena perencanaan yang jauh dari sempurna oleh sesuatu daerah, organisasi tidak efisien, kurangnya informasi mengenai potensi daerah dan berbagai faktor lain. Sebagai akibat banyaknya kekurangan dalam merumuskan dan melaksanakan penyebaran proyek-proyek ke berbagai daerah, pemerintah daerah dengan bantuan badan perencana daerah yang bersangkutan

haruslah secara aktif membantu perumusan rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Dalam mewujudkan sasaran jangka panjang pembangunan, yakni menuju masyarakat yang adil dan makmur telah dilakukan berbagai upaya yang mengarah pada tercapainya cita-cita tersebut. Pembangunan daerah yang merupakan rangkaian yang utuh dari pembangunan nasional pada beberapa tahun terakhir telah mulai menunjukkan kemajuan yang berarti dalam meningkatkan kinerja dari daerah tersebut. Proses pembangunan bukan hanya ditentukan oleh aspek ekonomi semata, namun demikian pertumbuhan ekonomi merupakan unsur yang penting dalam proses pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih merupakan target utama dalam rencana pembangunan daerah disamping pembangunan sosial.

Pertumbuhan ekonomi setiap daerah akan sangat bervariasi sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Pengembangan Ekonomi Lokal

Teori pertumbuhan ekonomi lokal menganalisis suatu wilayah sebagai suatu sistem ekonomi terbuka yang berhubungan dengan wilayah-wilayah lain melalui arus perpindahan faktor-faktor produksi dan pertukaran komoditas. Pembangunan dalam suatu wilayah akan

mempengaruhi pertumbuhan wilayah lain dalam bentuk permintaan sektor untuk wilayah lain yang akan mendorong pembangunan wilayah tersebut atau suatu pembangunan ekonomi dari wilayah lain akan mengurangi tingkat kegiatan ekonomi di suatu wilayah serta *interrelasi* (tidak terealisasi).

Pertumbuhan ekonomi dapat dinilai sebagai dampak kebijaksanaan pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan yang terjadi dan sebagai indikator penting bagi daerah untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan (Sirojuzilam, 2008:18). Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah peningkatan volume variabel ekonomi dari suatu sub sistem spasial suatu bangsa atau negara dan juga dapat diartikan sebagai peningkatan kemakmuran suatu wilayah. Pertumbuhan yang terjadi dapat ditinjau dari peningkatan produksi sejumlah komoditas yang diperoleh suatu wilayah.

Menurut Sukirno (2007:86) pertumbuhan regional dapat terjadi sebagai akibat dari penentu-penentu endogen (tenaga dari dalam daerah) ataupun eksogen (tenaga dari luar daerah), yaitu faktor-faktor yang terdapat di dalam daerah yang bersangkutan ataupun faktor-faktor di luar daerah, atau kombinasi dari keduanya. Penentu endogen, meliputi distribusi faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal

sedangkan penentu eksogen adalah tingkat permintaan dari daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan oleh daerah tersebut.

Perubahan sistem pemerintahan menimbulkan perubahan yang cukup signifikan dalam pengelolaan pembangunan daerah. Pola pembangunan daerah dan sistem perencanaan yang selama ini cenderung seragam telah berubah menjadi lebih bervariasi tergantung pada potensi dan permasalahan pokok yang dihadapi di daerah. Penetapan kebijaksanaan yang sebelumnya hanya sebagai pendukung kebijaksanaan nasional telah mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi yang berkembang di daerah. Kondisi ini juga memicu persaingan antara daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Richardson (2001:35) perbedaan pokok antara analisis pertumbuhan perekonomian nasional dan analisis pertumbuhan daerah adalah bahwa yang dititikberatkan dalam analisis tersebut belakangan adalah perpindahan faktor (*factors movement*). Kemungkinan masuk dan keluarnya arus perpindahan tenaga kerja dan modal menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi regional. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih cepat apabila memiliki keuntungan *absolute* (mutlak) kaya akan sumber daya alam dan memiliki keuntungan komparatif apabila daerah tersebut lebih efisien dari daerah lain dalam melakukan kegiatan produksi dan perdagangan (Sirojuzilam, 2008:26).

Pembangunan dengan pendekatan sektoral mengkaji pembangunan berdasarkan kegiatan usaha yang dikelompokkan menurut jenisnya ke dalam sektor dan sub sektor. Sektor-sektor tersebut adalah sektor pertanian, pertambangan, konstruksi (bangunan), perindustrian, perdagangan, perhubungan, keuangan dan perbankan, dan jasa. Pemerintah daerah harus mengetahui dan dapat menentukan penyebab, tingkat pertumbuhan dan stabilitas dari perekonomian wilayahnya. Identifikasi sektor dan sub sektor yang dapat menunjukkan keunggulan komparatif daerah merupakan tugas utama pemerintah daerah.

D. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tepatnya dinyatakan dalam pasal 1, UMKM dapat dijelaskan secara terperinci berikut ini:

- a. Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan Biro Pusat Statistik (BPS) Indonesia Tahun 2003, menggambarkan bahwa perusahaan dengan:

- a. Jumlah tenaga kerja 1-4 orang digolongkan sebagai industri kerajinan dan rumah tangga.
- b. Perusahaan dengan tenaga kerja 5-19 orang sebagai industri kecil
- c. Perusahaan dengan tenaga kerja 20-99 orang sebagai industri sedang atau menengah.
- d. Perusahaan dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang sebagai industri besar.

Pengertian UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/1/UKK Tanggal 29 Mei 1993 adalah:

- a. Usaha Kecil adalah yang memiliki total aset maksimum Rp 600 juta, tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati.
- b. Usaha menengah adalah usaha ekonomi yang dikembangkan dengan perhitungan aset (di luar tanah dan bangunan) mulai dari 200 juta sampai kurang dari 600 juta dengan jumlah tenaga kerja mulai 20 orang sampai dengan 99 orang.

2. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, pada pasal 6 dijelaskan kriteria-kriteria yang tepat mengenai UMKM.

1. Kriteria Usaha Mikro, ada dua kriteria usaha ini yakni:
 - a. memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil. Kriteria usaha ini meliputi:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah. Ada dua kriteria Usaha Menengah, yaitu:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Ada beberapa definisi UMKM yang digunakan oleh berbagai instansi di Indonesia, yaitu:

- a. UU No. 9 Tahun 1995 tentang UMKM, mengatur kriteria UMKM berdasarkan nilai aset tetap (diluar tanah dan bangunan) paling besar Rp 200 juta dengan omzet pertahun maksimal 1 miliar. Sementara itu berdasarkan inpres No. 10 Tahun 1999 tentang usaha menengah, batasan aset tetap (diluar tanah dan bangunan) untuk usaha menengah adalah Rp 200 juta hingga Rp 10 miliar.
- b. Badan Pusat Statistik (BPS) dan kementerian koperasi dan UMKM menggolongkan usaha sebagai UMKM jika memiliki omzet kurang dari Rp 1 miliar pertahun.
- c. Untuk usaha menengah, batasannya adalah usaha yang memiliki omzet antara Rp 1 miliar sampai dengan Rp 50 juta per tahun
- d. Departemen perindustrian dan perdagangan menetapkan bahwa industri sampai dengan Rp 5 miliar. Sementara itu, UMKM di bidang perdagangan dan industri juga dikategorikan sebagai usaha yang memiliki aset tetap kurang dari Rp 200 juta dan omzet per tahun kurang dari Rp 1 miliar (sesuai UU No. 9 Tahun 1995)
- e. Bank Indonesia menggolongkan usaha kecil dengan merujuk pada UU No. 9/1995, sedangkan untuk usaha menengah, BI menentukan sendiri kriteria aset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industri manufaktur (Rp 200 juta s/d Rp 5 Miliar) dan non manufaktur (Rp 200-600 juta)
- f. Badan Pusat Statistik (BPS) menggolongkan suatu usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja. UMKM adalah usaha yang memiliki pekerja 1-19 orang, usaha Menengah memiliki pekerja 20-99 orang, dan usaha besar memiliki pekerja sekurang-kurangnya 100 orang.

Rahmana (2008:1) menjelaskan Badan Pusat Statistik memberikan definisi terkait kriteria UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil termasuk usaha mikro merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha

menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai 99 orang.

3. Peran UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pengembangan lingkungan *entrepreneurship* sangat diperlukan dalam pembangunan lingkungan *entrepreneurship* mendorong tumbuhnya kemandirian suatu wilayah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Dari berbagai studi empiris, UMKM telah terbukti banyak memberikan kontribusi.

Amstrong dan Taylor (2000:18) menyebutkan lima argumen yang relevan mengenai peran UMKM dalam pembangunan ekonomi regional.

1. UMKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan.
2. UMKM memiliki kemampuan memunculkan industri-industri kecil lainnya yang bersifat fleksibel dan bervariasi serta memunculkan *entrepreneur* baru yang berani menanggung resiko
3. UMKM memiliki kemampuan mendorong terjadinya persaingan secara intensif antara UMKM bahkan usaha besar serupa. Hal ini sangat penting untuk mendorong lingkungan usaha yang kondusif dan berbudaya usaha yang kuat.
4. UMKM mendorong inovasi
5. UMKM mampu meningkatkan hubungan industrial (misal hubungan industri dengan buruh/karyawan) dan menyediakan lingkungan kerja yang baik dengan para karyawannya.

UMKM meningkatkan efek multiplier dan menciptakan keterkaitan. UMKM yang membeli bahan baku serta memanfaatkan jasa-jasa dari pasar lokal secara langsung membutuhkan adanya *supplier*.

4. Peran Pemerintah Terhadap UMKM

Pemerintah berupaya meningkatkan UMKM dari pemberian bantuan kredit dan juga pembinaan lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Adapun pembinaan yang dilakukan Pemerintah terhadap UMKM adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan.

Pengembangan usaha ini dilakukan dengan :

- 1) meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 2) memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk UMKM;
- 3) mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan;
- 4) meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah;

b. Pengembangan usaha dalam bidang pemasaran dilakukan dengan

cara:

- 1) melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- 2) menyebarluaskan informasi pasar;
- 3) meningkatkan kemampuan manajemen dan tehnik pemasaran;
- 4) menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil; memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi;
- 5) menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

c. Pengembangan usaha dalam bidang sumber daya manusia dilakukan

dengan cara :

- 1) memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- 2) meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial;

- 3) membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru;
- d. Pengembangan usaha dalam bidang desain dan teknologi dilakukan dengan :
- 1) meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
 - 2) meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
 - 3) meningkatkan kemampuan UKM di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
 - 4) memberikan insentif kepada UKM yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup;
 - 5) mendorong UMKM untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual;
- e. Membangun kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia

Usaha, dan masyarakat melalui pola:

- 1) inti-plasma;
- 2) subkontrak;
- 3) waralaba;
- 4) perdagangan umum;
- 5) distribusi dan keagenan;
- 6) bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).

Jika dilihat pada realita yang ada, pemerintah hanya menjalankan sebagian kecil dari peran yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan hanya sebagian kecil UMKM turut merasakan peran yang harus dijalankan pemerintah. Ada beberapa peran pemerintah yang sangat memberatkan UMKM dari segi waktu dan biaya seperti memperoleh hak atas kekayaan intelektual, dalam hal pemasaran dimana seringkali UMKM dibebankan biaya. Apabila pemerintah melakukan pembinaan, pemerintah hampir tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui

seberapa besar keberhasilan atau kegagalan dari pembinaan yang telah dilakukan. Keberhasilan UMKM yang terjadi selama ini di akibatkan bukan dari pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, namun keberhasilan UMKM terjadi karena kemandirian dan kerja keras yang dilakukan oleh pengusaha UMKM untuk bisa bertahan dalam dunia bisnis.

E. Konsep PPP (Public-Private Partnership)

1. Pengertian *Public-Private Partnership*

Public-Private Partnership (PPP) atau kemitraan Pemerintah dan Swasta dapat diterjemahkan sebagai perjanjian kontrak antara swasta dan pemerintah, yang keduanya bergabung bersama dalam sebuah kerja sama untuk menggunakan keahlian dan kemampuan masing-masing untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dimana kerjasama tersebut dibentuk untuk menyediakan kualitas pelayanan terbaik dengan biaya yang optimal untuk publik (*America's National Council On Public Private Partnership, 2000*). Model kemitraan hubungan pemerintah, swasta dan masyarakat yang dikemukakan oleh Savas dalam Rohmad, dkk (2009:3) bahwa penyediaan barang publik dapat dilakukan melalui privatisasi dimana pemerintah melibatkan pihak swasta dan masyarakat

Menurut Parente (2006) dari USAID Environmental Service program sebagaimana dikutip oleh Djuned (2007:1) Public-private

Partnership merupakan suatu perjanjian kerja sama atau kontrak, antara instansi pemerintah dengan badan usaha/pihak swasta:

- a. Pihak swasta melaksanakan sebagian dari fungsi pemerintah selama waktu tertentu.
- b. Pihak swasta menerima kompensasi atas pelaksanaan fungsi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Pihak swasta bertanggung jawab atas resiko yang timbul akibat pelaksanaan fungsi tersebut
- d. Fasilitas pemerintah, lahan atau aset lainnya dapat diserahkan atau digunakan oleh pihak swasta selama masa kontrak.

2. **Karakteristik *Public-Private Partnership***

Menurut Peter (1997) dalam Bimantoro (2010:27) karakteristik dari pola kerjasama *Public-Private Partnership* melibatkan dua pihak atau lebih salah satunya adalah pemerintah dan pihak swasta, kerja sama tersebut meliputi hubungan kerjasama jangka panjang antar pihak dengan berinteraksi secara terus-menerus. Tiap pelaku dalam kerjasama tersebut memberikan andil material dan non-material ke hubungan sehingga mendapat tanggung jawab masing-masing terhadap keluaran dari setiap aktifitas yang dilakukan.

Bimantoro (2010:28) mengatakan ada empat elemen dalam kerjasama pemerintah dengan swasta yaitu:

- a. Kerjasama meliputi dua pihak atau lebih, termasuk pemerintah dan swasta.

- b. Kerjasama pemerintah dan swasta memerlukan partner kerjasama yang mampu berperan sesuai dengan kapasitasnya.
- c. Hubungan yang mempunyai kepercayaan yang terus-menerus. Hal ini dapat dilihat dalam kontrak kerjasama sebagai dasar negosiasi.
- d. Para pihak harus menginvestasikan sumber daya material dan nonmaterial dalam kerjasama. Tiap bagian struktur organisasi akan menetapkan objek, tugas, *financial* dan tanggung jawab.

3. Bentuk dan Modalitas *Public-Private Partnership*

Secara konseptual dikenal beberapa bentuk kerjasama pemerintah dengan swasta adalah sebagai berikut:

a. Kontrak Servis

Kontrak antara pemerintah dan pihak swasta untuk melaksanakan tugas tertentu, misalnya jasa perbaikan, pemeliharaan atau jasa lainnya, umumnya dalam jangka pendek (1-3 tahun), dengan pemberian kompensasi. Contoh kontrak servis antara lain kontrak pemeliharaan jalan, pengumpulan dan pembuangan sampah, pemeliharaan jalan, pengerukan kali, jasa mobil derek.

b. Kontrak Manajemen

Pemerintah menyerahkan seluruh pengelolaan suatu infrastruktur atau jasa pelayanan umum kepada pihak swasta, dalam masa yang lebih panjang (3-8 tahun), biasanya dengan kompensasi tetap. Contoh kontrak manajemen antara lain perbaikan dan pemeliharaan jalan, pembuangan dan pengurangan sampah, pengoprasian instalasi

pengolahan air, pengelolaan fasilitas umum (rumah sakit, stadion olahraga, tempat parkir, sekolah)

c. Kontrak Sewa

Kontrak sewa adalah kontrak dimana pihak swasta membayar uang sewa untuk penggunaan sementara fasilitas umum, dan mengelola, mengoperasikan, serta memelihara, dengan menerima pembayaran dari para pengguna fasilitas. Penyewa atau pihak swasta menanggung resiko komersil. Masa kontrak umumnya antara 5-15 tahun. Contoh kontak sewa antara lain taman hiburan, terminal udara atau bandara, armada bis atau transportasi lainnya.

d. Kontrak Build-operate-Transfer (BOT)

Build-operate-Transfer (BOT) adalah kontrak antara instansi pemerintah dan badan usaha/swasta, dimana badan usaha bertanggung jawab atas desain akhir, pembiayaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebuah proyek investasi bidang infrastruktur selama beberapa tahun, biasanya dengan transfer aset pada akhir masa kontrak. Umumnya masa kontrak antara 10-30 tahun. Build-operate-Transfer (BOT) dikenal juga sebutan *Build and Transfer (BT)*, *Build-LeaseTransfer (BLT)*, *Build Own Operate (BOO)*, *Build Transfer Operate (BTO)*, *Contract Add Operate (CAO)*, *Develop Operate Transfer (DOT)*, *Rehab Operate Transfer (ROT)*, *Rehab Operate Own (ROO) Development*. Contoh kontrak BOT antara lain pembangkit

listrik, jalan toll, terminal udara, bendungan, instalasi pengolahan air, pelabuhan laut, fasilitas IT.

e. Kontrak Konsesi

Kontrak konsesi adalah struktur kontrak antara pemerintah dan swasta, dimana pemerintah menyerahkan tanggungjawab penuh kepada pihak swasta untuk mengoperasikan, memelihara, dan membangun suatu aset infrastruktur, dan memberikan hak untuk mengembangkan, membangun dan mengoperasikan fasilitas baru untuk mengakomodasi pertumbuhan usaha. Umumnya masa kontrak konsesi berlaku antara 20-35 tahun. Contoh kontrak konsesi antara lain minyak dan gas, pelabuhan udara (keseluruhan atau sebagian), jalan toll, pelabuhan laut, penyediaan dan distribusi air bersih, rumahsakit, fasilitas olahraga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nazir (2009:54) penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kilas balik pada masa sekarang. Merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan melakukan klarifikasi suatu peristiwa atau suatu pengetahuan secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam melakukan penelitian yang sistematis dan metodelis, diperlukan suatu alat untuk membedah suatu penelitian tersebut. Pentingnya metode penelitian dalam sebuah penelitian untuk memudahkan peneliti dalam memahami masalah yang diteliti serta mempermudah peneliti dalam mendapatkan data untuk menjawab tujuan peneliti. Penggunaan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif di karenakan dapat di gunakan untuk memahami makna dibalik data yang tampak dan untuk memahami kemitraan pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata (Diskoperindagpar) Kota Madiun dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) secara mendalam yang sesuai dengan tujuan penelitian.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu batasan masalah yang akan diteliti dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian itu. Menurut Sugiyono (2013:207) fokus penelitian adalah batasan masalah yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum dalam penelitian kualitatif. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan feasibilitas (adanya sumber daya) masalah yang akan dipecahkan, selain itu faktor keterbatasan tenaga dan waktu. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Kemitraan pemerintah daerah dan pelaku usaha mikro kecil menengah dalam meningkatkan ekonomi lokal, yaitu melalui:
 - a. Peningkatan modal
 - b. Peningkatan sumber daya manusia
 - c. Pengembangan prasarana (pemasaran)
2. Faktor pendorong kemitraan pemerintah daerah dan pelaku usaha mikro kecil menengah dalam meningkatkan ekonomi lokal masyarakat
 - a. Faktor yang mendorong pemerintah
 - b. Kontribusi UMKM terhadap PDRB Kota Madiun

C. Lokasi Penelitian Dan Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Madiun Provinsi Jawa Timur. Hal ini dikarenakan Kota Madiun merupakan kota yang banyak industri menengah dan industri kecil. Seperti industri sambel pecel, roti bluder cokro, lempeng puli dan batik khas madiun. Selain itu untuk mengetahui perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di kota Madiun dari tahun ke tahun. Bisa menjadi tolak ukur untuk pemerintah apakah sudah berhasil berkembang atau tidak. Dalam rangka pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data-data yang penulis perlukan dalam pembahasan skripsi ini maka sebagai lokasi penelitiannya diantaranya:

1. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata (Disperindagkoppar)
2. Beberapa Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Madiun.

D. Sumber Data

Menurut Silalahi (2009 : 289) data dapat dikumpulkan dari latar data (*data setting*) yang berbeda. Latar data yang di maksud ialah latar natural (*natural setting*) dimana fenomena atau peristiwa secara normal terjadi yang disebut *noncontrived setting*: dab latar artifical (*artificial setting*), baik di laboratorium, dalam rumah responden, di jalan atau di *mall* yang di sebut *contrived setting*. Sumber data dalam penelitian kualitatif dapat berupa manusia, peristiwa, atau aktivitas,tempat atau lokasi, benda, beragam gambar dan rekaman, dokumen atau arsip".Jenis sumber data menurut Sutopo (2002 : 57) adalah sebagai berikut:

1. Narasumber (Informan)

Jenis sumber data ini dalam penelitian pada umumnya dikenal sebagai responden. Manusia sebagai sumber data perlu dipahami, bahwa mereka terdiri dari beragam individu dan memiliki beragam posisi. Oleh karena itu di dalam memilih siapa yang akan menjadi informan, peneliti wajib memahami posisi dengan beragam peran serta yang ada sehingga dapat diperoleh informasi pernyataan maupun kata-kata yang diperoleh dari informan yang disebut data primer atau sering disebut sebagai informan kunci (*keyinforman*)

- 1) Bapak Heru Wasana selaku kepala bagian Koperasi dan UMKM di Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kota Madiun
- 2) Ibu Upik Zubaidah selaku pengelola UMKM kue seprong “fajar”
- 3) Ibu Siti Qomariah selaku pengelola batik retno kumbolo
- 4) Ibu herlin puspitasari selaku pengelola kerupuk puli “walet”

2. Peristiwa (Aktivitas)

Data atau informasi juga dapat dikumpulkan dari peristiwa, aktivitas, atau perilaku sebagai sumber data yang berkaitan dengan sasaran penelitiannya. Data atau informasi juga dapat diperoleh melalui pengamatan selama penelitian dilakukan. Peristiwa juga di dapat peneliti dari vidio yang dimiliki oleh dinas koperasi perindustrian perdagangan dan pariwisata kota madiun.

3. Dokumen dan arsip

Dokumen merupakan rekaman atau dukomen tertulis seperti arsip, database, surat-surat, rekaman, gambar, benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Pengumpulan dokumen dan arsip tidak dilakukan sendiri oleh penulis. Dokumen dan arsip bisa diperoleh penulis dari penelitian terdahulu. Dokumen dan arsip juga di peroleh dari hasil wawancara yang di sertai oleh pembuktian tertulis berupa dokumen laporan kegiatan dan arsip yang di miliki oleh dinas maupun pelaku UMKM. Beberapa dokumen yang digunakan sebagai kelengkapan data dalam penelitian diantaranya yakni:

- a. Arsip daftar jumlah UMKM yang produktif di Kota Madiun
- b. Data peningkatan PDRB kota madiun
- c. Data UMKM untuk pengajuan KUR
- d. Data data lain yang menunjang, seperti buku, jurnal, laporan-laporan, data internet, karya ilmiah terdahulu, dan data pendukung lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses atau cara mengumpulkan atau menghimpun data. Menurut Creswell (2012 : 266) langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi masalah penelitian,

mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi materi visual, serta usaha merancang *protocol* untuk merekam/ mencatat informasi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Teknik Wawancara adalah teknik cara menghimpun bahan keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan secara sepihak berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Narbuko dan Achmadai, (2007:83) wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap wajah mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan pada hampir semua penelitian kualitatif. Wawancara bisa saja dipahami sebagai pembicaraan antara dua pihak yang salah satu pihak bertugas mengajukan pertanyaan dan yang pihak lain memiliki kewajiban menjawab atas pertanyaan yang diajukan.
2. Teknik observasi adalah teknik pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. Pada dasarnya tujuan observasi adalah mendiskripsikan lingkungan yang diamati. Aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang

dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut (Herdiansyah, 2013:131)

3. Teknik Dokumentasi adalah mengumpulkan data atau informasi yang didapat dari dokumen, yaitu dokumen tertulis, arsip arsip, peraturan perundang undangan, catatan kegiatan dan lain lain yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam rangka menguatkan data yang telah di peroleh, kemudian juga tidak lupa mendokumentasikan semua kegiatan penelitian. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainya yang tertulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Herdiansyah 2013:143).

F. Instrumen penelitian

Instrumen (alat) pengumpulan data tersebut ada yang dibuat oleh peneliti ada juga yang sudah di standarkan. Instrumen yang disusun peneliti sendiri harus diupayakan untuk memenuhi ketiga persyaratan tersebut. Untuk menetapkan alat pengumpulan data mana yang akan dipilih oleh peneliti, terutama ditentukan oleh variabel yang akan diamati datanya, dengan kata lain alat yang digunakan harus disesuaikan dengan variabelnya. Pertimbangan lain memiliki alat pengambil data adalah pertimbangan dari segi praktis dan ekonomis (Narbuko dan achmadi,

2007:63). Dalam penelitian ini instrumen penelitian terdiri dari, peneliti, interview Guide dan alat dokumentasi.

1. Peneliti

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jeals, makan kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara (Sugiyono, 2013:223). Peneliti memiliki fungsi penuh dan terlibat aktif dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti sebagai instrumen berfungsi langsung dalam pengumpulan data pada situs penelitian menggunakan alat pengumpulan data yang sudah dijelaskan sebelumnya.

2. Interview Guide

Interview guide merupakan paduan atau pedoman yang digunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data melalui wawancara untuk memperoleh data secara langsung dari informasi atau responden. Dalam penelitian ini diperlukan interview guide yang digunakan untuk memperoleh data primer yang ditujukan kepada pihak Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan, dan pariwisata Kota Madiun, beberapa para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di Kota Madiun.

3. Alat Dokumentasi

Alat dokumentasi lain sebagai penunjang dan perlengkapan dalam penelitian ini diantaranya adalah kamera, buku catatan, alat tulis dan recorder yang digunakan selama wawancara ataupun selama pengambilan data pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kota Madiun dan pada tempat Usaha Mikro Kecil Menengah.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles, (2014:12) membuat tiga tahap pada analisis data kualitatif. Dimulai dari mencari penemuan data-data untuk menggambarkan hipotesis. Kemudian memilih data yang memiliki potensi dengan cara melakukan pengujian hipotesis. Dan terakhir data kualitatif yang berguna untuk melengkapi, memvalidasi atau memperkuat data kualitatif yang dikumpulkan dari data-data sebelumnya. Kekuatan data kualitatif terpusat pada kompetensi dengan analisis yang dilakukan. Miles menganalisis masalah melalui tiga proses: 1. Data condensation (kondensasi data) 2. Data display (penyajian data) 3. Conclusions drawing/verifying (penarikan kesimpulan/verifikasi).

a. Data condensation (kondensasi data)

Tahap pertama dalam analisis kualitatif adalah kondensasi data.

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, fokus,

menyederhanakan, dan mengubah data yang muncul dalam catatan tertulis di lapangan, transkrip, wawancara, dokumen, dan bahan-bahan empiris lainnya. Kondensasi data bertujuan untuk membuat data yang lebih kuat. Kondensasi data terjadi terus menerus pada setiap penelitian yang berorientasi kualitatif. Pengumpulan data pada kegiatan selanjutnya adalah menulis ringkasan, pengkodean, perkembangan tema, menghasilkan kategori, dan menulis memo analisis. Data kondensasi atau proses transformasi berlanjut setelah kegiatan lapangan selesai, sampai laporan akhir selesai. Kondensasi data adalah bentuk analisis yang mempertajam, fokus, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir bisa ditarik dan diverifikasi. Data kualitatif dapat diubah dengan berbagai cara, melalui seleksi, melalui ringkasan, memasukkan ke dalam pola yang lebih besar dan sebagainya.

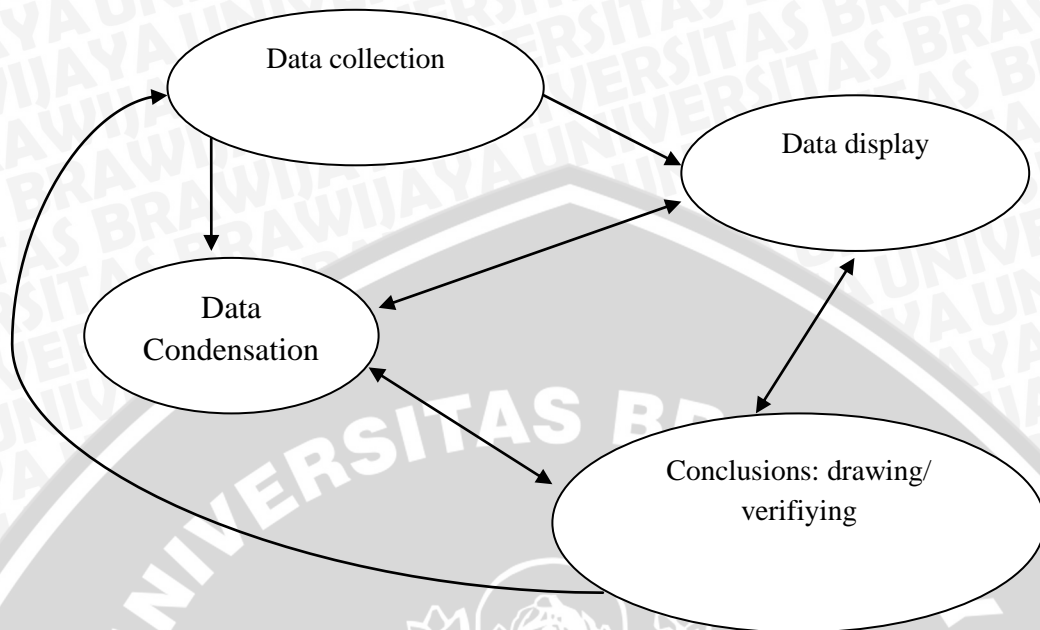
b. Data display (penyajian data)

Tahap kedua dalam analisis kualitatif adalah penyajian data. Secara umum melihat tampilan data membantu kita memahami apa yang terjadi untuk menganalisis lebih lanjut atau mengambil tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. Bentuk yang paling sering dalam penyajian data kualitatif adalah teks yang panjang. Hanya dengan menggunakan teks yang panjang seorang peneliti mungkin merasa mudah untuk langsung mengambil kesimpulan. Teks yang panjang akan berlebihan dalam memproses informasi dan kita akan cenderung

membuat pola untuk menyederhanakan. Penyajian data uang dimaksud meliputi berbagai jenis matrik, grafik, diagram dan jaringan. Semua dirancang untuk menyatukan informasi agar lebih mudah diakses sehingga peneliti dapat melihat apa yang terjadi dan dapat menarik kesimpulan secara benar atau melanjutkan pada analisis lain.

c. Conclusions drawing/veryfying (penarikan kesimpulan/verifikasi)

Tahap ketiga dalam analisis kualitatif adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kesimpulan akhir mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran cacatan lapangan, metode pengkodean, penyimpanan, dan pengambilan, kecanggihan peneliti, dan waktu yang diperlukan harus dipenuhi. Kesimpulan juga verifikasi sebagai hasil analisis. Pemaparan tiga tahap yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan pada sebelum selama dan setelah pengumpulan data dalam benyuk paralel, untuk membuat domain umum yang disebut “analisis”



Gambar 1 Analisis Data Model Interaktif

H. Keabsahan Data

Menurut Praswoto (2012 : 48) dalam penelitian kualitatif, kepercayaan terhadap hasil penelitian diuji dengan tiga cara, yaitu pengujian kredibilitas, serta proses dan hasil penelitian. Sedangkan menurut Moelong (1999:173) mengungkapkan bahwa keabsahan data diperlukan dengan teknik pemeriksaan. Karena kebenaran dan kepercayaan data hasil penelitian merupakan hal terpenting dalam penelitian. Pelaksanaan teknik didasarkan atas sifat kriteria yang digunakan, yaitu:

1. Derajat kepercayaan (*credibility*) yaitu mendapatkan dan memeriksa kredibilitas dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan sebagai berikut:

- a. Melakukan *peerdebriefing* adalah hasil penelitian didiskusikan dengan orang lain seperti dosen pembimbing dan teman yang memahami pokok tentang penelitian dan metode yang diterapkan
 - b. Triangulasi adalah hal yang dilakukan oleh peneliti mulai dari terjun kelapangan dengan berbagai wawancara maupun seperti berbincang biasa, observasi dan dokumentasi dengan tujuan untuk melihat kebenaran data tertentu dan membandingkan dengan data dari sumber lain.
2. Keteralihan yaitu persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk keteralihan tersebut, peneliti mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama.
 3. Ketergantungan yaitu melihat atau meneliti ketergantungan dan kepastian data dalam penelitian, maka hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti diuji ulang melalui proses penelitian dan hasil penelitian. Untuk mendapatkan drajat reabilitas dalam penelitian tercapai, perlu dilakukan audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap hasil dari penelitian.
 4. Konfirmasi atau kepastian yaitu menentukan apakah hasil ini benar atau salah, maka peneliti mendiskusikan dengan dosen

pembimbing ataupun narasumber dari setiap informan satu demi satu terhadap temuan atau informasi yang didapat dilapangan.



BAB IV

PEMBAHASAN

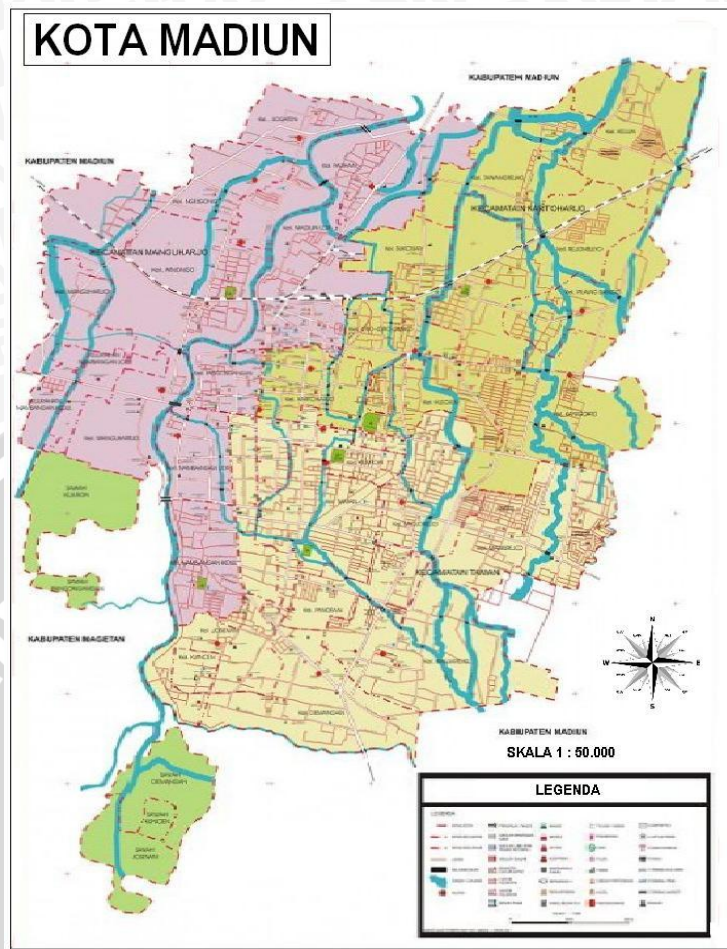
A. Gambaran Umum

1. Gambaran Umum dan Kependudukan Kota Madiun

Kota Madiun merupakan salah satu Kota di Provinsi Jawa Timur yang terletak pada $111^{\circ}\text{BT} - 112^{\circ}\text{BT}$ dan $7^{\circ}\text{LS}-8^{\circ}\text{LS}$. Wilayah Kota Madiun dikelilingi wilayah Kabupaten Madiun. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Madiun, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Geger, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wungu, dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Jiwan.

Luas wilayah Kota Madiun 33,23 km² terbagi menjadi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Mangunharjo dengan luas wilayah 10,04 km², Kecamatan Taman 12,46 km², dan Kecamatan Kartoharjo 10,73 km². Wilayah Kota Madiun terletak di dataran tinggi antara 63m-67m dari permukaan laut dengan suhu antara $20^{\circ}-35^{\circ}\text{C}$.

KOTA MADIUN



Jumlah penduduk kota madiun tahun 2013 adalah 174,114 jiwa, dengan besaran 28,89% penduduk tinggal di Kecamatan Mangunharjo. Sebesar 42,50% penduduk tinggal di Kecamatan Taman, dan sebesar 28,61% tinggal di Kecamatan Kartoharjo. Kecamatan Taman adalah wilayah yang paling padat penduduknya, yaitu mencapai 5.940 jiwa per km². Sementara 2 kecamatan lainnya, Kecamatan Mangunharjo dan Kartoharjo, memiliki kepadatan penduduk masing-masing 5.010 orang per km² dan 4.642 orang per km². Secara keseluruhan kepadatan penduduk Kota Madiun adalah 5.240 orang per km². Masyarakat Kota Madiun dilihat dari ketenagakerjaan, menurut data hasil survei angkatan kerja nasional tahun 2013, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

penduduk usia 15 tahun keatas Kota Madiun tahun 2013 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 62.53 menjadi 66,80. Artinya pada tahun 2013 dari setiap 100 orang terdapat sekitar 67 orang merupakan angkatan kerja. Seiring dengan peningkatan angka TPAK, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Madiun menurun 0,05% point dibanding Tahun 2012.

Sebesar 58, 13% dari jumlah angkatan kerja di Kota Madiun berjenis kelamin laki-laki. TPAK penduduk perempuan di Kota Madiun lebih rendah dibandingkan penduduk laki-laki, dikarenakan lebih banyak penduduk perempuan yang bukan angkatan kerja. Sementara tingkat pengangguran terbuka penduduk laki-laki lebih tinggi di bandingkan penduduk perempuan. Pada penduduk 15 tahun ke atas sebanyak 73,89% penduduk bekerja berusia antara 25-54 tahun, 13,87% berusia 15-24 tahun, dan 12,24% berusia lebih dari 55 tahun.

Menurut lapangan pekerjaannya sebagian besar penduduk Kota Madiun bekerja pada sektor jasa, yaitu sekitar 84,81%. Sebesar 12,66% bekerja di sektor industri dan hanya 2,53% penduduk bekerja pada sektor pertanian. Sekitar 68,06% dari total angkatan kerja di Kota Madiun memiliki pendidikan SLTA keatas, 23,17% berpendidikan SD ke bawah. Sedangkan dari 78.124 penduduk yang berumur 15btahun ketasa dan bekerja, sebanyak 67,29% memiliki pendidikan minimal SLTA, 16,79% berpendidikan SLTP dan sebanyak 23,64% berpendidikan SD kebawah.

Besarnya jumlah pengangguran merupakan salah satu masalah kependudukan yang secara umum terjadi di wilayah perkotaan. Jika di

tinjau dari tingkat kependidikan, penduduk Kota Madiun berumur 15 tahun keatas dan termasuk pengangguran terbuka sebagian besar memiliki pendidikan SLTA atau di atasnya. Sementara itu Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun diperoleh data mengenai pencari kerja dan penempatannya menurut jenis kelamin dan pendidikan. Pencari kerja yang terdaftar didominasi oleh lulusan SLTA ke atas yaitu sebanyak 2.216 orang sementara lulusan SD ke bawah dan SLTP hanya sedikit masing-masing sebesar 109 dan 43 orang. Dari 2.315 orang pencari kerja terdaftar terdiri atas 1.143 laki-laki dan 1.174 perempuan. Dari jumlah tersebut hanya 1.606 orang saja yang di tempatkan, 637 laki-laki dan 960 perempuan. Hal itu menunjukkan bahwa kesempatan kerja di Kota Madiun lebih terbuka untuk perempuan di bandingkan untuk laki-laki.

2. Gambaran Umum Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota Madiun

a. Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Pariwisata Kota Madiun

Visi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pariwisata Kota Madiun yakni mewujudkan masyarakat yang bekerja untuk maju dan sejahtera melalui optimalisasi peran kota madiun sebagai pusat perdagangan dan jasa skala swp”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen

penyelenggara pemerintah tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Sebagai penjabaran atas visi tersebut, dirumuskan misi selama masa jabatan 2009 – 2014 sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat (Partisipatoris)
- 2) Mewujudkan Pemerintah yang bersih, berwibawa dan transparan (Good and Clean Governance) melalui penegakan pakta integritas sebagai upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

b. Kedudukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota madiun

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 menjelaskan perubahan terminologi pembangian urusan pemerintah yang bersifat konkuren berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintah tersebut pada masing-masing tingkat pemerintah. Otonomi Daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan menurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah No.41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah merupakan perturan yang sifatnya lebih mengkhususkan dari Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2004. Peraturan Pemerintah ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organinsasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan

daerah masing-masing. Saat itu nama dari Dinas Perindustria, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Madiun.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah, disebutkan bahwa kedudukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, koperasi dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil menengah dan Kepariwisataaan yang kemudian munculah Peraturan Walikota No 41 tahun 2008 yang berlaku pada tanggal 1 January 2009 dimana dalam Perwali tersebut berisi rincian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pariwisata Kota Madiun yang berkedudukan di Jalan Salak No 61 Kota Madiun mempunyai wilayah kerja mencakup seluruh Kota Madiun. Adapun tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota Madiun adalah:

3. Tugas Pokok

Tugas dari Disperindagkoppar Kota Madiun adalah memimpin, mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan

4. Fungsi

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan, Energy dan Sumber Daya Mineral, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pariwisata;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang Perindustrian, Perdagangan, Energy dan Sumber Daya Mineral, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pariwisata;
- c) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian, Perdagangan, Energy dan Sumber Daya Mineral, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pariwisata;
- d) Pembinaan UPTD;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelayanan umum yang ada pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata meliputi: Pemberian Ijin Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gedung (TDG), Pembinaan Usaha Perdagangan, Pembinaan Pedagang kaki lima (PK5), Tanda Daftar Industri (IDI), Ijin Mnendirikan Hotel dan Restoran, Pembinaan Koperasi, Bimbingan Usaha dan Penyuluhan Hukum, Melaksanakan pelatihan pelatihan di bidang operasi baik yang dilaksanakan sendiri atau daerah lain, Pengalihan dan Pengawasan Koperasi.

Sesuai yang telah diamanatkan oleh pasal 22 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 maka Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota Madiun masuk dalam Perumpun Dinas yang bertitik berat pada bidang Perekonomian. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota Madiun Nomor 4 tahun 2008 pasal 22 terdiri dari:

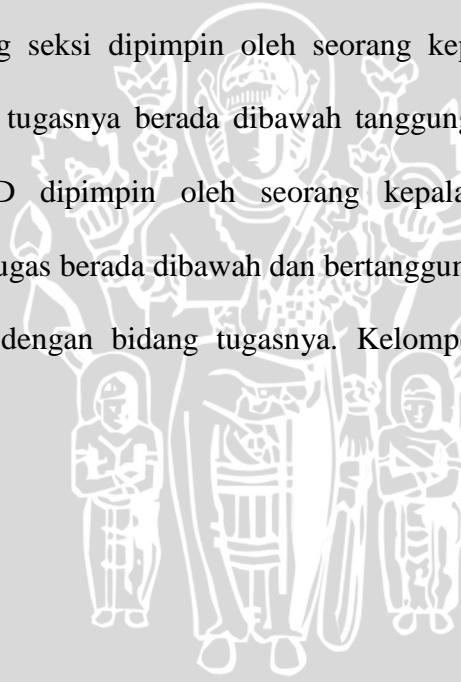
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
 - c. Sub Bagian keuangan
3. Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral membawahi:
 - a. Seksi Sarana Industri
 - b. Seksi Usaha dan Bimbingan Produksi
 - c. Seksi Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Bidang Perdagangan membawahi:
 - a. Seksi Bimbingan Usaha dan Perlindungan Konsumen
 - b. Seksi Pendaftaran Perusahaan
 - c. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah
5. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah membawahi:
 - a. Seksi Kelembagaan Koperasi
 - b. Seksi Pemberdayaan Koperasi
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kepariwisata
6. Bidang Kepariwisata membawahi:

- a. Seksi Pengembangan Kepariwisata
- b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kepariwisata

7. UPTD

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dan masing masing bidang di pimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah tanggung jawab kepada kepala bidang. UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang dalam menjalankan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Kelompok Jabatan Fungsional



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA KOTA MADIUN

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PARIWISATA**
SUDANDI, S.Sos
NIP. 19720925 199201 1 002

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT
DIDIK KUSMAHADI, SE
NIP. 19581031 198403 1 006

SUB BAG UMUM
YUNI DWI SETYOWATI
NIP. 19590602 198312 2 002

**SUB BAG PERENCANAAN
DAN KEPEGAWAIAN**
Dra. Ec. WIWIK SETYORINI
NIP. 19610914 198303 2 016

SUB BAG KEUANGAN
SIAM MURTININGSIH
NIP. 19600308 198102 2 001

**BIDANG PERINDUSTRIAN, ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL**
Drs. A. APRI TRI YUDIANTO
NIP. 19650415 199203 1 007

BIDANG PERDAGANGAN
TATEK WURYANDARI, SE
NIP. 19590311 198603 2 002

**BIDANG KOPERASI DAN
USAHA KECIL
MENENGAH**
MARYANTO. S. TP. M.Si

**BIDANG
KEPARIWISATAAN**
SLAMET SP, M.Si
NIP. 19600327 198505 1 009

SEKSI SARANA INDUSTRI
HARLIN PRASETYOWATI, S. Sos
NIP. 196804418 199803 2 005

**SEKSI BIMBINGAN
USAHA PERDAGANGAN
DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN**
MIEN ISTIRAHAYU, BSc
NIP. 19580406 198503 2 005

**SEKSI KELEMBAGAAN
KOPERASI**
NINA HARTATI, SH
NIP. 19650910 199603 2 001

**SEKSI PENGEMBANGAN
KEPARIWISATAAN**
RITA SUSANTI, S.Sos
NIP. 19740623 199803 2 004

**SEKSI USAHA DAN BIMBINGAN
PRODUKSI**
Dra. ENDANG TYAS SRIWATI
NIP. 19580115 198603 2 005

**SEKSI PENDAFTARAN
PERUSAHAAN**
SUPRIYONO, Sm. Hk.
NIP. 19590922 198103 1 007

**SEKSI PEMBERDAYAAN
KOPERASI**
SOEDARJANTO, SE
NIP. 19600303 198403 1 012

**SEKSI PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
KEPARIWISATAAN**
SAPTO SUSILOWATI, SE
NIP. 19630409 199003 2 004

**SEKSI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL**
G. DEWANTO T, SE, Msi
NIP. 19711209 199703 1 006

SEKSI METROLOGI
SITI QOMARIYAH, SE
NIP. 19620310 198303 2 023

**SEKSI PEMBERDAYAAN
USAHA KECIL
MENENGAH**
Drs. TUKILAN
NIP. 19600206 199403 1 004

UPTD

B. Penyajian data

Peneliti telah melakukan serangkaian kegiatan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai aktualisasi dan pencapaian tujuan penelitian. Hasil penelitian yang didapat tersebut kemudian disajikan peneliti sebagai jawaban akhir atas permasalahan yang diteliti. Data-data tersebut kemudian dipaparkan melalui narasi sebagai hasil penelitian. Hasil penelitian dibatasi oleh fokus penelitian yang telah ditetapkan mengenai strategi menciptakan iklim usaha mikro kecil menengah sebagai upaya peningkatan ekonomi lokal masyarakat di Kota madiun. Berikut ini adalah pemaparan dari peneliti terkait penyajian data berdasarkan keruntutan fokus penelitian:

1. Kemitraan Pemerintah Daerah dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah

Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur urusan daerahnya sendiri. Begitu pula dalam hal pengembangan UMKM daerah, pemerinath daerah mempunyai peran penting. Dimana sudah diatur dalam Peraturan perundangan-undangan Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kota madiun merupakan kota yang dikenal dengan kuliner khasnya yaitu pecel dan brem. Ada banyak UMKM yang menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan hasil produksinya. Tidak semua UMKM yang bekerjasama dengan pemerintah lantas UMKM tersebut produktif. Ada sekitar 50 UMKM yang berkerjasama dengan Pemerintah. Namun hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui bahwa Kota Madiun memiliki kerajinan batik tulis dan masih banyak lagi usaha mikro kecil yang lainnya. Berikut daftar usaha mikro kecil menengah yang di rangkum penulis yang dinilai masih lumayan produktif.

Tabel 1. Daftar Beberapa UMKM yang Produktif Di Kota Madiun

No	Nama Usaha / Jenis Usaha	Pemilik
----	--------------------------	---------

1	Kue Semprong “fajar”	Ufik Zubaidah
2	Batik Retno Kumolo	Siti Qomariah
3	Roti Bluder “cokro”	Sri Wahyuni
4	Tempe Kripik “kartini”	Kartini
5	Toko Oleh-Oleh “mirasa”	Tri Nugrahayu
6	Batik Auliya	Wiwin Munawaroh
7	Roti “langgeng”	Sumarmi
8	Brem “Seruling emas”	Adi Wahyono
9	Sambel pecel “yu gembrot”	Khasanah
10	Kerupuk Puli “walet”	Herlin Puspitasari

Sumber: Disperindagkopar Kota Madiun 2015 (diolah penulis)

Kemitraan pemerintah yakni merupakan kemitraan atau kerjasama yang dilakukan Pemerintah untuk memajukan UMKM. Pemerintah dalam penelitian ini adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata (Disperindagkopar) Kota Madiun sebagaimana yang peneliti dapat dari hasil wawancara dengan Kabid Koperasi Bapak Heru Wasana dalam kemitraan pemerintah dengan pelaku UMKM yakni:

a. Peningkatan modal usaha (Permodalan)

Permodalan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh para pengusaha. Untuk mengatasi permasalahan ini Pemerintah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata Kota Madiun memberikan bantuan permodalan dengan memberikan kredit bagi para pengusaha. Sebagai mana yang diungkapkan oleh Kabid Koperasi bapak Heru Wasana Disperindagkopar Kota Madiun yang mengungkapkan sebagai berikut:

“Secara umum bantuan permodalan disini ada 2 yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit dana bergulir (Dagulir). Disini kredit dana bergulir yang diberikan kepada UMKM yang memenuhi persyaratan dari kredit dana bergulir dengan bunga serendah-rendahnya untuk UMKM dengan pemberian kredit modal kerja maksimal Rp.50.000.000,- dengan bunga 6% pertahun atau 0,5% perbulan dengan angsuran awal 5 bulan setelah penerimaan atas kredit (wawancara pada 2 maret 2015 pukul 10:00 WIB, di Kantor Disperindagkopa)

Berikut ketentuan mengenai pengajuan kredit dana bergulir untuk UMKM yang dikutip dari brosur resmi Disperindagkopar Kota Madiun sebagai berikut:

1. Mengajukan proposal kredit modal kerja dana bergulir kota Madiun melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pariwisata Kota Madiun
2. Merupakan UMKM yang mempunyai usaha produktif dan usahanya layak
3. Fotokopy perijinan (SIUP/TDP/NPWP)
4. Fotokopy KSK/ Kartu susunan keluarga
5. Fotocopy identitas pemilik / penanggungjawab
6. Pas foto pemilik/ penanggung jawab: 4x6 sebanyak 2 lembar
7. Laporan keuangan (neraca dan perhitungan hasil usaha) minimal 2 tahun
8. Fotocopy agunan/ jaminan kredit (sertifikat tanan/ BPKB)

Selain pemberian kredit dana bergulir, pemerintah daerah pernah memberikan satu kali dana hibah kepada beberapa pelaku umkm yang dirasa membutuhkan serta memberikan bantuan lain berupa alat-alat untuk pengrajin atau pelaku usaha mikro kecil menengah. Dana hibah dan bantuan ini berikan satu kali agar pelaku usaha mikro kecil menengah tidak bergantung pada pemerintah dan mendidik para pelaku usaha mikro kecil menengah bisa bertanggungjawab dengan terhadap usaha yang dimiliki. Oleh sebab itu, kredit dana bergulir merupakan solusi untuk pelaku usaha mikro kecil menengah yang membutuhkan modal dengan proses pengajuan yang mudah dan bunga yang ringan. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Siti Qomariah selaku pemilik dari usaha mikro kecil batik tulis Retno Kumolo, yang mengatakan yakni:

Modelnya hampir sama seperti bank pada umumnya, kita pinjam memakai agunan tapi bunganya rendah, 6% untuk setahun. Dari pihak disperindagkopar

menawarkan, kita mengajukan harus disertai proposal. Untuk mengajukan ini tidak sulit tetapi harus antri. Karna yang mengajukan banyak dan kapasitas kreditnya itu dibatasi (wawancara pada tanggal 8 maret 2015 pukul 09:00 WIB, di rumah produksi batik tulis Retno Kumolo)

Kredit dana bergulir ini merupakan salah satu alternatif yang diberikan oleh disperindagkoppar untuk mengatasi masalah modal. Walaupun kredit dana bergulir ini mempunyai bunga yang rendah tetapi tidak sedikit pelaku usaha mikro kecil yang menggunakan dana pribadi. Mengingat banyaknya antrian yang ingin mendapatkan kredit dana bergulir. Selain itu para pelaku juga merasa takut bila tidak bisa mengembalikan pinjaman itu. Hal ini sama halnya yang diungkapkan oleh Ibu Upik selaku pengurus dan pemilik usaha kue semprong dan kripik di Kota Madiun.

Kami pernah diberikan tawaran kredit dana bergulir dari pemerintah. Tapi kita tidak ambil kredit tersebut. Karna takut misalnya kita tidak bisa mengembalikan sesuai tanggal jatuh tempo. Tau sendiri usaha ini kadang rame pesanan kadang juga sepi. Jadi kami hitungannya pemasukannya itu tidak mesti. (wawancara tanggal 10 maret 2015 jam 16:00 dirumah produksi kue semprong dan kripik pisang)

Pembelian modal kredit dana bergulir ini tidak berjalan sesuai dengan harapan pemerintah. Terbukti dari 10 pelaku usaha yang produktif, Cuma 1 pelaku yang menggunakan kredit usaha bergulir ini. Batik retno kumolo milik ibu siti qomariah yang menggunakan kredit dana bergulir ini. Data ini peneliti dapat dari hasil wawancara oleh bapak heru wasana yakni:

Jumlah pelaku usaha mikro kecil yang mengajukan kredit dana bergulir tidak banyak. Dari jumlah itu kalau tidak salah hanya satu pelaku usaha mikro kecil menengah yang mengajukan dan sekarang sudah tidak mengajukan. Karna dia mengajukan dari tahun 2009 – 2014. Jadi kredit dana bergulir yang dia ajukan sudah lunas. (wawancara 20 maret 2015 pukul 09:00 WIB di Kantor Disperindakppar Kota Madiun)

Tabel 2. Jumlah UMKM Yang Mengajukan Kredit Usaha Dana Bergulir Pada Diskoperindagpar Kota Madiun

No	Nama Usaha	Pemilik	Kredit Dana Bergulir- Jumlah Dana	Periode
1	Kue Semprong "fajar"	Ufik Zubaidah	-	
2	Batik Retno Kumolo	Siti Qomariah	Mengajukan – 50.000.000	2009 s.d 2014
3	Roti Bluder "cokro"	Sri Wahyuni	-	
4	Tempe Kripik "kartini"	Kartini	-	
5	Toko Oleh-Oleh "mirasa"	Tri Nugrahayu	-	
6	Batik Auliya	Wiwin Munawaroh	-	
7	Roti "langgeng"	Sumarmi	-	
8	Brem "Seruling emas"	Adi Wahyono	-	
9	Sambel pecel "yu gembrot"	Khasanah	-	
10	Krupuk Puli "walet"	Herlin Puspitasari	-	

Sumber: Disperindagkoppar Kota Madiun 2015, (diolah penulis)

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan mayoritas pelaku usaha mikro kecil menengah lebih memilih menggunakan modal sendiri untuk mengembangkan usahanya ketimbang harus mengajukan kredit dana bergulir. Para pelaku usaha mikro kecil menengah ini mengaku kalau kebutuhan modal itu bukanlah permasalahan utama. Hal ini diungkapkan oleh ibu Herlin pemilik usaha Krupuk Puli

Kami pernah ditawarkan mengenai kredit dana bergulir itu. Tapi kami menolak, karna yang kami butuhkan bukan dana. Sekarang kalok kita kredit dana bergulir sama saja kita berhutang. Sedangkan yang kami butuhkan itu produk kami laris. Kalok kita berhutang dan produk kami tidak ada yang beli. Sama saja kita rugi kan. Mending beli saja produk kami dari pada memberi pinjaman modal ke kami. (wawancara tanggal 22 maret 2015 pukul 15:00 WIB di rumah produksi krupuk puli)

Dari hasil wawancara diatas bisa dilihat bahwa pemerintah daerah Kota Madiun melalui Disperindagkoppar Kota Madiun telah memudahkan akses permodalan kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah. Kredit dana bergulir merupakan cara yang cukup efektif yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permodalan. Hal ini bisa dilihat bahwa mengajukan kredit dana bergulir ini dipermudah dengan bunga yang cukup rendah sehingga meringankan para pelaku usaha mikro kecil menengah. Namun meskipun begitu tidak sedikit para pelaku usaha mikro kecil yang memakai dana pribadi untuk modal. Hal ini dikarenakan permodalan bukanlah masalah utama bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah.

b. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal terpenting dalam setiap UMKM. Sumber daya manusia merupakan penentu UMKM untuk terus mengembangkan usahanya. Peningkatan SDM disini merupakan hal yang utama dilakukan oleh Pemerintah untuk memajukan UMKM yang sudah ada. Jika hanya fokus pada UMKM nya saja tidak kepada sumber daya manusia nya sama saja tidak ada perkembangan. Jika sumber daya manusia sudah bagus maka dengan sendirinya akan memajukan UMKM yang ada.

Peningkatan sumber daya manusia bisa berupa pelatihan ketrampilan, pengelolaan manajemen, memotivasi agar bisa maju pemebrdayaan dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan sumber daya manusia pemerintah daerah melalui Disperindagkoppar kota madiun mengadakan pelatihan untuk para pelaku

usaha mikro kecil menengah. Hal ini di ungkapkan oleh bapak Heru Wasana selaku Kepala Seksi UMKM dan koperasi Disperindagkoppar Kota Madiun mengatakan bahwa “kami selaku perwakilan dari pemerintah mengadakan pelatihan kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah. Kalau untuk tahun ini kami mengadakan *Training of Trainer for UMKM*. Itu salah satunya yang kami ada kan. Ada beberapa pelatihan yang diadakan oleh kami.” (wawancara pada tanggal 24 maret 2015 pukul 10:00 WIB dikantor Disperindagkoppar Kota Madiun)

Pelatihan ini selain memberikan ketrampilan, pembinaan dan pelatihan kepada pelaku usahan mikro kecil hal ini bertujuan juga untuk mengurangi jumlah pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan kepada ibu-ibu rumah tangga agar lebih produktif. Adanya pelatihan dibenarkan oleh ibu siti qomariah pemilik Batik Retno Kumolo yakni:

Pemerintah memberikan kita pelatihan, pelatihan yang diadakan yakni pelatihan kewirausahaan kompetitif melalui pelatihan batik. Yaa walaupun pelatihan tidak dilakukan sering tapi ada lah. Kami difasilitasi juga mengenai trobosan yang paling bagus memanfaatkan dana juga untuk alih profesi kegiatan kegiatan baru. (wawancara pada tanggal 23 maret 2015 pukul 15:00 WIB di rumah produksi batik retno kumolo)

Pelatihan yang diberikan kepada perajin batik maupun pelaku usaha mikro kecil menengah lainnya merupakan salah satu cara yang paling sering digunakan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai usaha mikro kecil menengah ini. Selain itu yakni strategi pengembangan yang dilakukan oleh Disperindagkoppar Kota Madiun adalah dengan pendampingan. Pemerintah melakukan pendampingan dengan tujuan untuk memonitor proses pengembangan usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Madiun. Selain pemerintah bertindak sebagai mediator antara pelaku usaha mikro kecil menengah satu

dengan yang lain. Hal tersebut dikatan oleh bapak heru wasana selaku Kabid Koperasi dan UMKM di Disperindagkoppar Kota Madiun yakni :

Ada lain strategi yang dilakukan pemerintah, yaitu pendampingan. Kami juga melakukan pendampingan untuk mengarahkan pelaku usaha mikro kecil menengah dari satu produk diarahkan untuk menjadi sentra, sentra produk. Karena harapan kami produk-produk dari usaha mikro kecil menengah ini bisa memenuhi pasar di wilayah Kota Madiun maupun regional. (wawancara pada tanggal 24 maret 2015 pukul 10:00 WIB di kantor Diperindagkoppar Kota Madiun)

Tabel 3. Jenis pelatihan yang diberikan kepada pelaku UMKM

No	Tahun	Jenis Pelatihan	Intensitas- Jmlh peserta
1	2013	Managemen Pengelolaan Koperasi dan UMKM	1x- 50 UMKM
2	2014	Pelatihan Kewirausahaan Kompetitif kepada UMKM	1x- 70 UMKM
3	2015	Peningkatan sarana dan prasarana UMKM	1x- 50UMKM
4	2015	Training of trainer for UMKM	1x-55 UMKM

Sumber: Disperindagkoppar Kota Madiun 2015 (diolah penulis)

Berdasarkan tabel 3 jenis pelatihan yang di berikan oleh pemerintah memberikan manfaat kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah untuk terus berkembang. Berkembangnya usaha mikro kecil menengah dikarenakan setiap pelatihan yang diberikan pemerintah berbeda-beda jenis pelatohnya sehingga setiap pelaku usaha mikro kecil yang mengikuti pelatihan akan mendapat banyak ilmu mengenai cara mengembangkan usaha dan pengelolaannya. Hal ini di ungkapkan oleh Mbak Upik selaku pemilik usaha kue semprong dan keripik pisang “Fajar” yakni:

Pelatihan yaa lumayan laah mbak yang diberikan kepada kami pelaku usaha mikro kecil. Dari Kota Madiun ada, dari provinsi juga ada. Berbeda-beda sih setiap pelatihan yang diberikan kepada kami itu. Pelatihan dasar pengenai usaha mikro kecil menengah, cara pengelolaanya, pelatihan mengenai IT juga dan lain sebagainya mbak. (wawancara pada tanggal 28 maret 2015

pukul 16:00 WIB di rumah produksi kue semprong dan kripik pisang “fajar”)

Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu keberhasilan dari berkembangnya usaha mikro kecil menengah. Dari hasil wawancara yang penulis dapat, sumber daya manusia yang dikembangkan tidak hanya pelaku usaha mikro kecil menengah, tetapi dari pihak pemerintah. Pemimpin Daerah dan pelaku usaha mikro kecil menengah harus bersinergi untuk mengembangkan usaha mikro kecil menengah dimulai dari sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang terlatih, mandiri dan inovatif secara langsung akan mendorong berumbuhnya usaha mikro kecil menengah di Kota Madiun lebih produktif dan berkembang.

c. Pengembangan Prasarana (pemasaran)

Pengembangan prasarana adalah salah satu yang diperlukan dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil menengah. Dalam undang-undang nomer 20 tahun 2008 pasal 9 tentang sana dan prasarana, tertulis bahwa untuk menumbuhkan iklim usaha, pemerintah perlu melakukan pengadaan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha mikro kecil menengah. Prasarana merupakan fasilitas penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha untuk usaha mikro kecil menengah. Secara umum pelaku usaha mikro kecil menengah masih bergantung pada pemerintah daerah dalam segi pemasaran. Perlu adanya fasilitas pemasaran yang dapat mendukung berkembangnya usaha mikro kecil menengah untuk meningkatkan usaha yang

konduusif. Hal ini sama dengan pernyataan bapak heru wasana kabid UMKM dan Koperasi yakni:

Untuk saat ini pemasaran masih di Kota Madiun saja untuk hasil produksi dari pelaku usaha mikro kecil menengah. Itunganya mereka ini masih lumayan bergantung pada Pemerintah Daerah. (wawancara pada tanggal 23 maret 2015 pukul 09:00 WIB di kantor Disperindagkoppar Kota Madiun)

Prasarana yang menjadi kebutuhan utama dari para pelaku usaha mikro kecil menengah yakni mengenai pemasaran. Ketersediaan sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi pelaku usaha mikro kecil menengah perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah. Maka dari itu pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pariwisata Kota Madiun mengadakan pengembangan prasarana pemasaran melalui mengikut sertakan hasil produksi usaha mikro kecil menengah untuk pameran yang diadakan di daerah maupun provinsi. Hal ini diungkapkan oleh bapak heru wasana selaku kepala bagian koperasi dan UMKM Disperindagkoppar Kota Madiun, sebagai berikut:

Kami selalu mengikut sertakan UMKM kami yang ada dimadiun untuk mengikuti berbagai kegiatan pameran yang diadakan oleh pemerintah. Kami sudah ada beberapa kegiatan yang diikuti oleh UMKM yang ada di Kota Madiun ini. (wawancara pada tanggal 12 april 2015 pukul 09:00 WIB di kantor Disperindagkoppar Kota Madiun)

Tabel 4. Pameran produk UMKM thn 2013-2015

No	Pameran	Tempat dan Tahun
1	Pameran Produk UMKM Nasioal	Balickpapan/ 2013
2	Jatim Fair	Surabaya/2014
3	Promosi produk UMKM dlm rangka Harkonas	Surabaya/2014
4	Pameran produk UMKM dikota Madiun	Madiun/2015
5	Pasar Rakyat	Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim (setiap tahun keliling di kabupaten seluruh Jatim)

Sumber: Disperindagkoppar Kota Madiun, 2015 (diolah penulis)

Berdasarkan tabel 4 pengembangan pemasaran melalui pameran yang diadakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat merupakan salah satu usaha pemerintah dalam memperluas pemasaran. Pengembangan skala usaha adalah usaha untuk memperbesar kapasitas usaha. Pengembangan pemasaran ini bisa dilakukan dengan dengan kerja sama atau kemitraan antar pelaku usaha mikro kecil menengah dengan cara membentuk kelompok. Pengelompokan ini dilakukan agar mempermudah pelaku usaha mikro kecil menengah untuk mendapatkan akses modal, pempdistribusian, dan pengembangan inovasi produk.

Pengembangan pemasaran ini sangat di butuhkan oleh para pelaku usaha mikro kecil menengah. Pengembangan pemasaran melalui teknologi merupakan alternatif yang dapat membantu pemasaran dari hasil usaha mikro kecil menengah. Dengan adanya teknologi di perlukanya penguasaan dalam bidang teknologi. Teknologi sayang membantu dalam bidang pemasaran dan pengembangan inovasi. Adanya kerjasama antara pemerintah dan *stakeholder* yang bergerak dalam bidang teknologi akan lebih mendorong majunya usaha mikro kecil menengah di Kota Madiun.

2. Faktor Pendorong Kemitraan Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha Mikro Kecil

Menengah Dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal Masyarakat

a. Faktor Yang Mendorong Pemerintah

Dalam krisis ekonomi yang terjadi di Negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti

aktifitasnya, sector Usaha Kecil dan Menengah terbukti lebih tangguh dalam menghadapi masalah krisis tersebut. Peran Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia sangat besar dan telah terbukti menyelamatkan perekonomian bangsa pada saat dilanda krisis ekonomi tahun 1997, hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan oleh Kabid Koperasi dan UMKM bapak Heru Wasana yakni:

UMKM lah yang justru dapat tetap survive dan bertahan sedangkan perusahaan – perusahaan besar yang begitu luar biasanya mendapat dukungan dari pemerintah masa lalu ternyata tidak mampu menghadapi krisis bahkan banyak yang bangkrut dan berguguran.(wawancara pada tanggal 2 maret 2015 pukul 10:00 WIB di kantor Disperindagkoppar Kota Madiun)

Terbukti saat krisis global yang terjadi beberapa waktu lalu, UMKM hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang sehat. UMKM merupakan salah satu sektor industri yang sedikit bahkan tidak sama sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia. Dengan bukti ini, jelas bahwa UMKM dapat diperhitungkan dalam meningkatkan kekompetitifan pasar dan stabilisasi sistem ekonomi yang ada.. Dengan demikian UMKM dapat dijadikan andalan untuk masa yang akan datang dan harus didukung dengan kebijakan-kebijakan yang kondusif, serta persoalan-persoalan yang menghambat usaha-usaha pemberdayaan UMKM harus dihilangkan. Karena UMKM mampu memulihkan ekonomi, untuk membuka kesempatan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah UMKM menjadi sangat strategis, karena potensinya yang besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat, dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam hal ini pemerintah memberikan dukungan atau dorongan kepada pelaku UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Agar UMKM di kota Madiun semakin eksis

juga bertambah banyak, dengan bertambah banyaknya UMKM dampaknya yakni meningkatkan PAD Kota Madiun. Selain itu juga UMKM yang tumbuh dan berkembang secara otomatis mampu mendorong perekonomian lokal dengan penyerapan tenaga kerja, menggali potensi-potensi yang belum dikembangkan.

- a. Faktor apa saja yang mendorong pemerintah dan pelaku usaha mikro kecil menengah

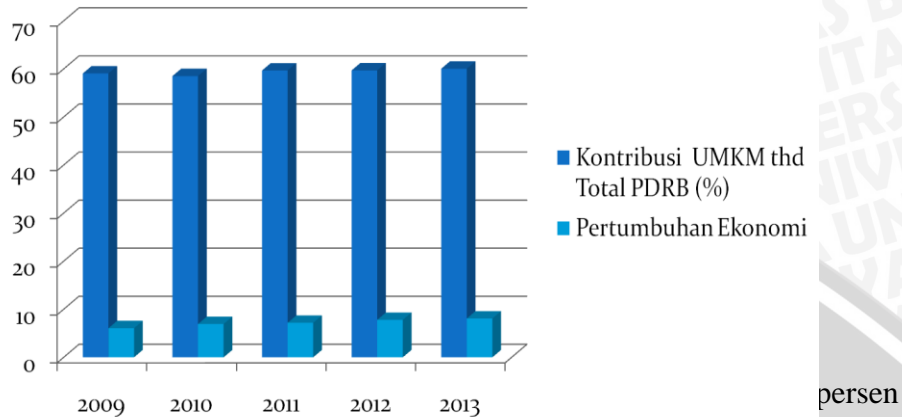
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Adapun pembinaan yang dilakukan Pemerintah terhadap UMKM adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan.
- b) Pengembangan usaha dalam bidang pemasaran .
- c) Membangun kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat.
- d) Pengembangan usaha dalam bidang sumber daya manusia.
- e) Pengembangan usaha dalam bidang desain dan teknologi

b. Kontribusi UMKM Terhadap PDRB Kota Madiun

Jika UMKM Kota Madiun meningkat secara langsung UMKM memberikan kontribusi terhadap meningkatnya PDRB Kota Madiun. Seperti yang tercantum dalam buku Madiun Dalam Angka, yang mencatat sebagai berikut:

Gambar 1. Kontribusi UMKM terhadap PDRB kota Madiun



NO	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Kontribusi UMKM thd Total PDRB (%)	59,06	58,51	59,67	59,69	60,03
2.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,06	6,93	7,18	7,79	8,07

Sumber: BPS, Madiun dalam angka 2014

Sangat jelas tercatat di atas bahwa UMKM memberikan kontribusi yang cukup baik dalam PDRB dan pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun. Hal ini juga disampaikan oleh bapak heru wasana yang saya wawancari pada tanggal 2 Maret 2015 di kantor Disperindagkoppar pukul 10:00 WIB. Beliau menyatakan bahwa:

“UMKM pada masa krisis masih eksis diberbagai sektor, pertanian, jasa, perdagangan, kontruksi dll. Walaupun angkanya tidak terlalu tinggi tetapi dari sisi PDRB dan PAD memberikan kontribusi cukup bagus”.

Dalam hal ini UMKM memainkan perannya, diantaranya dalam mengurangi pengangguran UMKM telah berperan aktif menyerap tenaga kerja, yang secara tidak langsung mengurangi tingkat pengangguran di indonesia. Dan juga dalam hal pendapatan nasional UMKM juga mempunyai kontribusi diantaranya melalui pajak yang harus di keluarkan.

C. Analisis Data dan Pembahasan

1. Kemitraan Pemerintah Daerah dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor usaha yang memberikan masukan lumayan besar terhadap perekonomian masyarakat. Ini terbukti dari banyaknya usaha mikro kecil menengah mulai tumbuh pada setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Sama dengan halnya di daerah Kota Madiun, yang sekarang ini banyak usaha mikro kecil menengah yang baru. UMKM mempunyai peran dalam menyediakan lapangan pekerjaan di Kota Madiun serta membantu meningkatkan perekonomian Daerah. Badan pusat statistik Kota Madiun tahun 2014 tercatat ada sekitar 22.790 unit UMKM/UKM yang ada di Kota Madiun. UMKM tersebut terdiri dari usaha ekonomi produktif, seperti industri kreatif, dan industri makanan dll.

Banyaknya usaha mikro kecil menengah yang ada dikota madiun, tetapi hanya sebagian saja yang produktif. Secara tidak langsung, hal ini merupakan bahwa usaha mikro kecil menengah di Kota Madiun belum bisa berkembang secara optimal dikarenakan masih terdapat kendala. Kendala yang di hadapi oleh para pelaku usaha mikro kecil menengah di antaranya yakni masalah permodalan dan manajerial yang meliputi produksi, pemasaran dan juga sumber daya manusia.

Kendala dalam memperoleh modal saat para pelaku usaha mikro kecil menengah mendapatkan pesanan merupakan permasalahan yang seringkali dihadapi oleh mereka. Selain itu, banyak para pelaku usaha mikro kecil menengah hanya melakukan produksi saat mendapat orderan atau pesanan dari konsumen. Hal ini di karenakan kurangnya pengentahuan sumber daya manusia tentang pemasaran.

Kendala-kendala yang di hadapi oleh para pelaku usaha mikro kecil menengah merupakan sorotan bagi pemerintah. Dalam hal ini Disperindagkoppar yakni dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan iklim usaha. Melihat hal ini perlu adanya sinergi pemerintah daerah untuk mengembangkan usaha mikro kecil menengah dan meminimalis kan kendal-kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro kecil menengah.

Setiap daerah perlu memberdayakan usaha mikro kecil menengah dengan tujuan mengembangkan potensi yang ada pada usaha mikro kecil menengah. Kemitraan pemerintah ini di fokuskan untuk usaha mikro kecil menengah yang masih mulai merintis usaha. Menurut Sriyana (2010:98) ada tujuh aspek dalam pemberdayaan yakni permodalan, pembangunan prasarana, pengembangan skala usaha, perluasan jaringan pemasaran dan kemitraan, pengembangan sumber daya manusia, akses teknologi, dan iklim bisnis kondusif. Dilihat dari teori ini diantaranya sesuai dengan kondisi usaha mikro kecil menengah di Kota Madiun yang saat ini kemitraan tersebut sedang dilakukan oleh Disperindagkoppar Kota Madiun. Adapun kemitraan yang dilakukan pemerintah yang dilakukan oleh disperindagkoppar dalam meningkatkan ekonomi lokal yakni antara lain:

a. Peningkatan modal usaha (Permodalan)

Modal yakni salah satu kendala dalam membuka usaha. Modal adalah aspek utama atau penentu dalam kelangsungan sebuah usaha mikro kecil menengah yang didirikan. Peningkatan permodalan perlu dilakukan untuk kemudahan kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah dalam mengakses permodalan. Menurut sriyana (2010)

yang perlu di amati dalam pemberdayaan usaha mikro kecil menengah melalui aspek permodalan adalah:

- 1) Bagaimana pemberian bantuan modal ini tidak menimbulkan ketergantungan;
- 2) Bagaimana pemecahan aspek modal ini dilakukan penciptaan sistem yang kondusif baru usaha mikro kecil menengah untuk mendapatkan akses dilembaga keuangan;
- 3) Bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsisten.

Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam proses peningkatan permodalan. Dikarenakan pemerintah daerah merupakan pemegang kebijakan dalam aspek finansial. Dalam akses permodalan saat ini tengah dilakukan pemerintah Kota Madiun melalui Disperindagkopar Kota Madiun. Akses yang diberikan yakni dengan bantuan modal melalui kredit dana bergulir. Kredit dana bergulir untuk usaha mikro kecil menengah maksimal Rp 50.000.000 dengan bunga 0,5% per bulan, dengan periode untuk angsuran awal 5 bulan setelah penerimaan dari kredit. Kredit dana bergulir ini di berikan kepada usaha mikro kecil menengah yang memenuhi persyaratan.

Selain bertujuan untuk memberikan kemudahan permodalan kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah, kredit dana bergulir ini bertujuan untuk mendidik para pelaku usaha mikro kecil menengah untuk tidak bergantung kepada pemberian dan secara hibah. Para pelaku usaha mikro kecil menengah kebanyakan bergantung kepada pemebrian dari pemerintah. Dengan kredit dana bergulir ini belajar untuk mendidik para pelaku usaha mikro kecil menengah agar bisa bertanggung jawab terhadap usaha yang dijalani.

Kredit dana bergulir ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kota Madiun dalam mengembangkan usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Madiun. Dengan kredit dana bergulir ini merupakan kemudahan bagi para pelaku usaha mikro kecil untuk meningkatkan atau mengembangkan usahanya. Karena dengan bunga yang cukup rendah dan memberikan proses yang cukup mudah untuk pengajuan. Meski begitu tidak sedikit para pelaku usaha mikro kecil menengah yang menggunakan dana pribadi untuk mengembangkan usahanya. Bagi mereka menggunakan kredit dana bergulir sama saja memberikan mereka beban, mereka takut jika tidak bisa mengembalikan sesuai waktu yang sudah ditentukan dan mendapatkan denda. Ketakutan ini dikarenakan tidak menentunya hasil penjualan hasil produksi mereka, tidak menentunya pemasukan mereka. Pemasukan mereka tergantung pada ramainya konsumen yang membeli produk mereka. Hal ini yang membuat sebagian para pelaku usaha mikro kecil menengah tidak berani mengajukan kredit dana bergulir.

Kredit dana bergulir yang menurut pemerintah dinilai cara paling efektif untuk meminimalisir dampak dari kesulitan permodalan ternyata belum berjalan dengan lancar dan baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah usaha mikro kecil menengah dan hanya sebagian kecil yang mengajukan kredit dana bergulir ini. Dari 10 UMKM yang dipilih oleh penulis hanya satu yang mengajukan kredit dana bergulir yakni Ibu Siti Qomariah selaku pemilik batik retno kumolo. Selebihnya pelaku usaha mikro kecil menengah lebih memilih dana pribadi dan menggunakan laba dari penjualan produk. Data ini menunjukkan bahwa modal bukanlah permasalahan utama bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah.

b. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Aspek utama UMKM adalah sumber daya manusia yang berperan sebagai penggerak suatu usaha. Usaha mikro kecil menengah di Kota Madiun membutuhkan SDM yang terampil, telaten, dan terlatih. Dengan begitu sangat diperlukan adanya peningkatan sumber daya manusia untuk mengoptimalkan potensi usaha mikro kecil menengah. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Disperindagkoppar yakni dengan memberikan pelatihan kepada pelaku usaha mikro kecil menengah. Hal ini seperti teori dari Sriyana (2010) yang mengungkapkan bahwa “dalam pengembangan UMKM, pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UMKM dalam aspek kewiraswastaan, administrasi dan pengetahuan serta ketrampilan dalam pengembangan usaha”.

Pelatihan yang diberikan kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah atau masyarakat cukup sering dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan secara lebih baik mengenai usaha mikro kecil menengah. Dengan diadakannya pelatihan dari Disperindagkoppar Kota Madiun sangat bermanfaat untuk para pelaku usaha mikro kecil menengah. Pelatihan ini merupakan tempat dimana para pelaku usaha mikro kecil menengah mengembangkan inovasi dan kreasi hasil produksinya. Pelatihan ini ditujukan kepada SDM, dan setiap pelatihan bertujuan untuk menanamkan kemandirian kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah. Jadi pelatihan yang diberikan harus meliputi beberapa aspek yakni sosial ekonomi, aspek material dan fisik, aspek manajerial, dan aspek intelektual SDM. Sama dengan halnya pendapat Jamasy (2004:4) bahwa pemberdayaan yang diterapkan meliputi segala aspek, antara lain aspek sosial ekonomi, aspek material dan fisik, aspek intelektual SDM dan aspek manajerial/pengolahan. Sesuai dengan teori tersebut pemerintah Kota Madiun melalui Disperindagkoppar Kota Madiun memberikan pelatihan yang didalamnya terdapat teori

pembelajaran dan praktek. Pelatihan tersebut ada beberapa teoridan praktek yang diantaranya pelatihan dasar usaha, pelatihan manajerial usaha, pelatihan IT dan lain-lain.

Pemberdayaan berupa pelatihan tidak dapat dilakukan hanya sekali saja. Hal ini sesuai dengan apa yang di ungkapkan oleh Jamasy (2004:8) bahwa suatu pemebdayaan tidak bisa dilakukan dengan ukuran kecepatan waktu dan tempat, melainkan dengan proses kesinambungan.

c. Pengembangan Prasarana (Pemasaran)

Pengembangan prasarana (pemasaran) merupakan suatu yang diperlukan dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro kecil menengah. Undang-undang nomor 20 tahun 2008 pasal 9 tentang sarana dan prasarana, tertulis bahwa untuk menumbuhkan usaha pemerintah perlu mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha mikro kecil menengah. Prasarana merupakan fasilitas penunjang utama terselenggaranya suatu usaha mikro kecil menengah yang kondusif. Pengembangan prasarana pemasaran dan kemudahan akses konsumen untuk sampai ke tempat produk menjadi komponen penting dalam upaya penciptaan iklim usaha yang kondusif. Pemerintah Kota Madiun melalui Disperindagkoppar Kota Madiun memberikan bantuan prasarana pengembangan pemasaran melalui mengikut sertakan usaha mikro kecil menengah ke acara yang diadakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Pengembangan pemasaran ini merupakan masalah utama dari pelaku usaha mikro kecil menengah. Produktivitas tidak akan ada gunanya apabila produk yang dihasilkan

tidak terjual dengan baik. Pengembangan pemasaran dilakukan dengan memperluas jangkauan usaha, terutama dalam segi pemasaran. Pengembangan pemasaran ini dilakukan dengan menjalin hubungan atau kerjasama dengan pusat pameran usaha mikro kecil menengah. Hal ini senada dengan teori Sriyana (2010:100) yang mengungkapkan “upaya perluasan jaringan pemasaran dapat dilakukan dengan berbagai macam strategi misalnya kontak dengan berbagai pusat-pusat informasi”.

Pengembangan pemasaran produk usaha mikro kecil menengah membutuhkan jaringan yang luas. Teknologi merupakan alternatif yang bisa membantu mengembangkan usaha mikro kecil melalui pemasaran. Dengan itu dibutuhkan penguasaan teknologi untuk membantu pengembangan usaha mikro kecil jaringan pemasaran.

Demikian pula dengan usaha mikro kecil yang ada di kota madiun yang perlu penguasaan teknologi dalam proses pengembangan pemasaran untuk usahanya. Undang-undang nomor 20 tahun 2008 pasal 20 tentang pengembangan dalam bidang desain dan teknologi, bahwa perlu adanya peningkatan kemampuan usaha mikro kecil menengah dalam bidang desain dan teknologi. Adanya kerjasama antara pemerintah Kota Madiun melalui Disperindagkoppar dengan *stakeholder* yang bergerak dalam bidang desain dan teknologi dapat mendorong berkembangnya usaha mikro kecil menengah Kota Madiun. *Stakeholder* yang bekerja sama dalam pengembangan akses teknologi dan desain adalah PT.Telkom.

Disperindagkoppar Kota Madiun bekerjasama dengan PT.Telkom untuk memberikan pelatihan teknologi kepada pelaku usaha mikro kecil menengah. Pelatihan dilakukan yakni pada kemudahan akses pemasaran melalui online. Pengembangan

pemasaran hasil dari usaha mikro kecil menengah secara online menggunakan internet akan lebih hemat biaya dikarekan tidak membutuhkan biaya akomodasi dan menghemat waktu karna dapat dilakukan kapan saja. Oleh karna itu penguasaan teknologi sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro kecil menengah, selain untuk memberikan pengetahuan yang baru juga memberikan manfaat langsung dari penghemat biaya dan waktu. Dengan begitu perlu diadakan pelatihan IT, pemerintah daerah berharap usaha mikro kecil menengah dapat menjadi usaha mikro kecil menengah yang mandiri dalam aspek pemasaran. Walaupun begitu, tidak semua usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Madiun setuju dengan menggunakan pemasaran secara online. Beberapa dari mereka memilih untuk memasarkan hasil produksinya dengan cara manual.

2. Faktor Yang Mendorong Pemerintah Daerah Dan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal

a. Faktor Yang Mendorong Pemerintah

Dalam krisis ekonomi yang terjadi di Negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sector Usaha Kecil dan Menengah terbukti lebih tangguh dalam menghadapi masalah krisis tersebut. Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia sangat besar dan telah terbukti menyelamatkan perekonomian bangsa pada saat dilanda krisis ekonomi tahun 1997, kata Kabid Koperasi dan UMKM bapak Heru Wasana pada wawancara 2 Maret 2015 “UMKM lah yang justru dapat tetap survive dan bertahan sedangkan perusahaan – perusahaan besar yang begitu luar biasanya mendapat dukungan dari pemerintah masa lalu ternyata tidak mampu menghadapi krisis bahkan banyak yang bangkrut dan berguguran.”

Melihat penjabaran di atas, maka terlihat mengapa pemerintah mendorong UMKM agar lebih maju, agar lebih berkembang. Karna UMKM mampu mewujudkan suatu daerah bisa mewujudkan pertumbuhan Ekonomi. Dengan begitu pemerintah bisa pemeratakan pembangunan yang ada di pusat dengan pembangunan yang ada di daerah.. Sebagai mana yang dijelaskan oleh Sukirno, 1985:13 pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

Inilah yang menjadi analisa dalam pengembangan produk lokal di kota madiun. Dibutuhkannya Tenaga Penyuluh Lapangan melakukan pengamatan secara langsung dan berdiskusi dengan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah pada sentra binaan untuk dapat memperoleh data dan berbagai informasi yang berkaitan dengan Usaha Mikro Kecil Menengah binaan. Selain berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, Tenaga Penyuluh Lapangan juga mendapatkan masukan yang sangat membantu tugas pendampingan dari pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah tersebut dan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Madiun beserta jajarannya. Sebagaimana umumnya pelaku usaha mikro kwcil menengah, semua permasalahan sangat kompleks dan saling berkaitan. Berikut ini merupakan hasil identifikasi dari masing-masing Sentra pelaku usaha mikro kecil menengah :

A. Permasalahan yang terjadi di ukm dan industri lokal kota madiun

1. Sentra Batik Tulis

- Pembukuan keuangan yang belum ada.
- Pemasaran produk pengrajin yang bergantung datangnya pembeli.
- Motif batik yang kurang variatif.

- Perijinan usaha yang belum ada.
- Limbah proses pewarnaan yang belum diolah secara benar.
- Belum adanya jiwa wirausaha yang kompeten pada Pengrajin.

2. Sentra Makanan

- Kurangnya permodalan akibat dari sistem pembayaran giro.
- Kurangnya tenaga pemasar produk.
- Perijinan usaha yang belum ada.
- Pembukuan keuangan yang belum tersusun secara rapi dan benar.
- Merek yang belum terdaftar.
- Belum adanya jiwa wirausaha yang kompeten pada Pengrajin

B. Berikut ini merupakan hasil yang telah dicapai selama kegiatan penyuluhan dan pendampingan Pengrajin IKM & UKM di kota madiun :

1. Sentra Batik Tulis

- Fasilitasi pameran yang ada dalam di Wilayah Provinsi Jawa Timur atau Kota Madiun.
- Pemantauan secara berkala terhadap pengisian pembukuan sederhana yang telah disusun secara bersama-sama antara pengrajin dan petugas Tenaga Penyuluh Lapangan.
- Membantu dalam pemasaran produk melalui promosi.

2. Sentra Makanan

- Fasilitasi pinjaman modal lunak tanpa agunan dan tanpa bunga dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

- Fasilitas pameran yang ada dalam di Wilayah Provinsi Jawa Timur atau Kota Madiun.
- Membantu dalam pengurusan perijinan usaha.
- Sosialisasi proses pengurusan Merk di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual melalui Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang.

b. Kontribusi UMKM Terhadap PDRB Kota Madiun

Tidak dapat di pungkiri bahwa salah satu sektor yang menopang perekonomian di Indonesia adalah dari sektor UMKM (usaha menengah kecil dan mikro), karena melalui sektor inilah semua aspek yang berkaitan dengan pola kehidupan manusia bersumber, mulai dari sektor konsumsi, pangan, dan papan, sebagai contoh dalam segi konsumsi banyak sekali usaha-usaha UMKM yang berperan aktif, seperti usaha pengolahan hasil pertanian, gabah, produksi pangan dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi sektor lain yang mengisi aktifitas lalu lintas produksi. Kita kembali lagi kepada kejadian yang menggemparkan perekonomian Indonesia dan beberapa negara di dunia pada tahun 1997 / 1998 yang mana pada saat itu usaha berskala besar tidak mampu bertahan menghadapi derasnya terpaan angin krisis moneter, pada waktu itu banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan atau pailit di karenakan tidak mampu lagi memproduksi, hal itu di sebabkan oleh meningkatnya harga bahan baku yang impor, yang mana pada saat itu harga bahan baku impor mengalami kenaikan yang sangat drastis dan juga kenaikan dari sisi pajak impornya, bukan karena hal itu saja

usaha berskala besar pailit, namun juga di sebabkan oleh meningkatnya biaya cicilan utang yang di sebabkan naiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar, selain itu sektor perbankan yang umumnya juga mengalami keterpurukan sehingga menjadi permasalahan dalam hal permodalan pada usaha-usaha skala besar, lain halnya dengan UMKM pada saat itu yang cenderung bertahan, bahkan kian bertambah,,hal ini di karenakan oleh Pertama, sebagian besar UMKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan. Kedua, sebagian besar UKM tidak mendapat modal dari bank. Implikasinya keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga, tidak banyak mempengaruhi sektor ini. Berbeda dengan sektor perbankan bermasalah, maka usaha skala besar ikut terganggu kegiatan usahanya. Sedangkan usaha UMKM dapat bertahan. Di Indonesia, UMKM mempergunakan modal sendiri dari tabungan dan aksesnya terhadap perbankan sangat rendah.

Dalam analisis makro ekonomi UMKM memiliki peran strategis dalam pendapatan nasional dan pengurangan pengangguran sesuai dengan UU.no 20 th 2008 bab III pasal V yang berbunyi “*meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan*”. Dalam ekonomi makro salah satu yang menjadi pokok permasalahan adalah pengangguran dan membahas tentang pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini UMKM memainkan perannya, diantaranya dalam mengurangi pengangguran UMKM

telah berperan aktif menyerap tenaga kerja, yang secara tidak langsung mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Dan juga dalam hal pendapatan nasional UMKM juga mempunyai kontribusi diantaranya melalui pajak yang harus dikeluarkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi , Isbandi RUMKMinto . 2008. *Pemberdayaan , Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Ahmad Erani Yustika. 2002. *Pembangunan dan Krisis, Memetakan Perekonomian Indonesia*. Grasindo : Jakarta
- Ali, Faried. 1997. *Metodologi Penelitian Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Safarudin Alwi, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Strategi Keunggulan Kompetitif)*, BPFE Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Armstrong, H., & Taylor, J. (2000). *Regional Economics and Policy*, United kingdom : Blackwell Publishing
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Angka Sementara Hasil Sensus Tahun 2013*. Januari. BPS Kota Madiun. Madiun
- Bagir Manan. 1994. *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan : Jakarta.
- Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustofa Adidjoyo, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 1988
- Creswell. John W. 2012. *Research design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Dwidjowijoto dan Wrihatnolo, 2007, *Analisis Kebijakan*, Jakarta: Elexmedia Komputindo.
- H.B. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press.
- Hessel Nogi .S T. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Jhingan, M.L. (1999), *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta
- Jhingan, M.L. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta.
- Mardikanto, Totok.dan Soebianto, Poerwoko. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.

Meleong, Lexy J. 1999. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya

Michael P. Todaro, 1983, *Ekonomi Pembangunan di Dunia ketiga*, terjemahan Mursid, Penerbit Balai Aksara, Jakarta.

Miles, Matthew B. Dan A. Michael Hurbeman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : UI Press

Munir, Badrul, 2002, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*, cetakan ke-2 2002, Bappeda Propinsi NTB, Mataram.

Nazir, Moh. (2009). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nugroho, I. Dan Rochimin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta : LP3ES

Pamudji, S. 1990. *Pembinaan Perkotaan di Indonesia*. Ichta: Jakarta.

Parmoto, A. Pius., dan M. Dahlan Al Barry., 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya : Penerbit Arloka

Partomo. T.S. dan Soejoedono. 2002. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta

Pemberdayaan Koperasi, dan usaha mikro, kecil dan menengah (umkm). Di akses pada tanggal 16 november 2014 dari : www.bappenas.go.id/get-file-server/node/826/

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan masyarakat

Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta : Ar- Ruzz Media

Priyambodo RH, 2014, Menkop: Jumlah Koperasi dan UMKM Terus Meningkat. <http://www.antaraneews.com/berita/416949/menkop-jumlah-koperasi-dan-umkm-terus-meningkat>. 12 Desember 2014

Raja, Oskar, Ferdy Jalu, Vincent D'ral. 2003. *Kiat Sukses Mendirikan dan Mengelola UMKM*. Jakarta: L PRESS.

Richardson, H.W. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Edisi Revisi 2001. Penerjemah Paul Sitohang. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Setiawan, Dadang. 2004. *Kemitraan Berbasis Good Governance : Studi Kasus Pembangunan Pasar Kosambi Bandung*. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Silalahi, Ulber. 2009. *Metode penelitian Social*. Bandung : PT.Refika Aditama

Sirojuzilam dan Mahalli, K. 2010. *Regional Pembangunan, Perencanaan, dan Ekonomi*, Penerbit USU Press, Medan.

Sirojuzilam,2008. *Ekonomi dan Perencanaan Regional*, Medan ; Penerbit Pustaka Bangsa.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Sujanto, Djoko. 1990. *Perkembangan Kota Baru*. Jakarta : Mineograph.

Sukirno Sadono, 1985, *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, FEUI, Bisma Grafika, Jakarta

Sukirno, Sadono.2007. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada

Sukirno. 1985. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Sulistiyani, Ambar T. 2004. *Kemitraan Dan Model – Model Pemberdayaan*, Yogyakarta : Gava Media Jogja

Sumarto Hetifa Sj, 2003, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia

Sumitro, Djojohadikusumo. 1987. *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Pembangunan*, Jakarta: Bagian Penerbitan: LP3ES.

Sutoro Eko, 2002, *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim*, Samarinda, Desember 2002.

Suyanto, Bagong. (2005).*Metode Penelitian Sosial: Bergabai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Prenada Media

Syafrizal, 1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Wilayah Indonesia Bagian Barat*. Prisma LP3ES, 3,27-38.

Tarigan, R. (2006), *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta.

Todaro, Michael P., 2000, *Economic Development*, Seventh Edition, Addison-Wesley, England

Undang – Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Wrihatnolo, Randi. R. & Dwidjowijoto, Riant Nugroho, 2007. *Manajemen Pemberdayaan*: Jakarta: Elexmedia Komputindo.

Yusuf, Maulana, 1999, “*Model Rasio Pertumbuhan (MRP) sebagai Salah Satu Alat Analisis dalam Perencanaan Wilayah dan Kota. Aplikasi Model: Wilayah Bangka-Belitung*”. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Volume XLVII, Nomor 2,

